

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA
KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN PRINSIP
MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**LISNADILA
NIM: 18.2900.052**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PINRANG BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH**



OLEH

**LISNADILA
NIM: 18.2900.052**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Berdasarkan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Lisnadila

Nim : 18.2900.052

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2896/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag (.....)

NIP : 19571231 199102 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Damirah, S.E., M.M (.....)

NIP : 19760604 200604 2 001

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Berdasarkan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Nama Mahasiswa : Lisnadila

Nim : 18.2900.052

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam No. B.2896/In.39.8/PP.00.9/8/2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Damirah, S.E., M.M. (Sekretaris) (.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota) (.....)

Dr. Usman, M.Ag. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. &
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah-Nya, taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Faisal Wahab dan Ibu Sumarni di mana dengan pembinaan dan berkah doa setulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M, selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Kepada Ibu An Ras Triastuti, M.E selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
8. Kepada pegawai Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada Kakek saya Usman, yang sangat berjasa bagi penulis.
10. Kepada kedua Adik saya Usram dan Ahmad Romy yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis
12. Kepada yang terkhusus Ikrar Prianbudi yang telah banyak memberikan bantuan dan kontribusi kepada penulis selama menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

13. Kepada teman-teman seperjuangan di Pondok Jombloh Official, Asti Wandasari, Nur Aulia, Uswatun Hasanah, Harfika, dan Nur Asyikin yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan khususnya prodi manajemen keuangan syariah yang selalu memberikan banyak bantuan dan selalu ada dikala penulis meminta bantuan serta selalu memberi semangat.
15. Seluruh pihak yang berjasa dalam proses penulisan skripsi ini baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal *jari'ah* dan memberikan seluruh rahmat dan pahala-Nya. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 03 Januari 2023
11 Jumadil Akhir 1444 H

Penulis



Lisnadila
NIM: 18.2900.052

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lisnadila
NIM : 18.2900.052
Tempat/Tgl. Lahir : Kajuangin / 15 Oktober 2000
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas
Pernakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Berdasarkan
Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 03 Januari 2023
11 Jumadil Akhir 1444 H

Penyusun,



Lisnadila
NIM. 18.2900.052

ABSTRAK

LISNADILA. *Akuntabilitas Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Berdasarkan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah*. (Dibimbing oleh M. Nasri Hamang dan Damirah).

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari undang-undang Republik Indonesia dan peraturan-peraturan pemerintah. Pengelolaan keuangan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang baik seharusnya bersifat transparansi atau terbuka dan di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah atau konsep islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas dari sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan laporan pertanggungjawaban kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang yang ditinjau dari prinsip manajemen keuangan syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dilokasi penelitian dan data primer berasal dari dokumen, arsip kantor dinas, buku-buku serta jurnal yang terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme penggunaan anggaran pada kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Realisasi anggarannya dilakukan dengan baik dibuktikan dengan beberapa pencapaian hasil kinerja. Pengelolaan keuangan pada kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pirang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pada prinsip manajemen keuangan syariah kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang tidak menggunakan prinsip manajemen keuangan syariah, namun dalam praktiknya kegiatan-kegiatan dan pengelola keuangan yang dilakukan tetap memperhatikan kaidah-kaidah islam dan tetap memperhatikan kesejahteraan dan keadilan umat.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Administrasi Keuangan, Prinsip Manajemen Keuangan syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Akuntabilitas	12
2. Administrasi Keuangan.....	16
3. Laporan Keuangan	17
4. Anggaran.....	20
5. Manajemen Keuangan Syariah	23
6. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan dalam Islam.....	25

7. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).	27
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Fikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
C. Fokus Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	34
F. Uji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Sistem dan Mekanisme Administrasi Keuangan	39
C. Bentuk Akuntabilitas Administrasi Keuangan	59
D. Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang berdasarkan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah	64
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXIX

DAFTAR TABEL

No	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tinjauan Penelitian Relevan	9
4.1	Capaian Per Indikator Sasaran Tahun 2021 Dinas Peternakan Dan Perkebunan	50
4.2	Anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2021	54
4.3	Laporan dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang	57
4.4	Kategori Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	59
4.5	Capaian per Indikator sasaran strategis ketiga tahun 2021	60

DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
4.1	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional	43



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian ke Bupati Pinrang	V
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian ke Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang	VI
3	Rekomendasi Penelitian	VII
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	VIII
5	Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang	IX
6	Aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang	XI
7	Laporan Neraca Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang	XII
8	Pedoman Wawancara	XVII
9	Transkrip Wawancara	XIX
10	Surat Keterangan Wawancara	XXV
11	Dokumentasi	XXVII
12	Biodata Penulis	XXIX

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

1. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

2. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: <i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>rauḍatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madīnatul fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>Najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-hajj</i>
نُعْم	: <i>nu‘ima</i>
عُدُّوْ	: <i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ	: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	: ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa

Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِلهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,

maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = ﷺ

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagian.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen merupakan suatu langkah atau proses yang sangat dibutuhkan dalam dunia perusahaan atau organisasi, karena dalam proses manajemen terdapat tahapan-tahapan yang dapat digunakan untuk mencapai keberhasilan perusahaan secara efektif dan efisien. Proses manajemen selalu berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, yang di dalamnya terdapat upaya organisasi bekerja sama dengan sepenuhnya mengarahkan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan dan visi misinya. Dalam proses manajemen, manusia memegang peran yang sangat penting, hal ini sering kita dengar sebagai “*the man behind the organization*”.¹ Manajemen terdiri dari beberapa bidang atau bagian yang salah satunya adalah bagian pengelolaan keuangan atau biasa di sebut manajemen keuangan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang yang paling penting dari beberapa ilmu manajemen. Dengan demikian, melakukan tindakan bisnis atau pengelolaan suatu organisasi tidak terlepas dari peran sentral manajemen keuangan, karena tanpa adanya manajemen keuangan proses pengalokasian dana akan sulit dan proses produksi tidak berjalan baik.² Manajemen keuangan digunakan dalam semua jenis perusahaan, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, serta perusahaan industri dan ritel. Manajemen keuangan juga digunakan dalam kegiatan pemerintah, mulai dari sekolah, rumah sakit, hingga departemen jalan tol.³

¹ Kadar Nurzaman, *Manajemen Perusahaan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hal.7.

² Mohammad Najib, “*Manajemen Keuangan*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 29

³ Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, “*Manajemen Keuangan, Edisi Kedepalpn*”, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 6

Manajemen keuangan syariah merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan berdasarkan prinsip syariah⁴. Dalam hal ini manajemen keuangan syariah merupakan suatu proses pengelolaan keuangan yang untuk mencapai tujuannya harus dilandaskan pada hukum islam (prinsip syariah). Manajemen dikatakan telah memenuhi prinsip syariah apabila: 1) mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, 2) mementingkan adanya struktur organisasi, dan 3) membahas soal sistem.⁵

Pengelolaan keuangan daerah telah dijabarkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.⁶ Pengelolaan keuangan daerah dijabarkan lagi dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan diterapkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini Undang-Undang tersebut telah memberikan wewenang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam keluasaan mobilisasi sumber dana, menentukan arah tujuan dan target penganggaran.

Masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak dapat dipisahkan dengan pemahaman tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

⁴ Muhamad, “*Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*”, (Cet-II; Yogyakarta: UPP ATIM YKPN, 2018), hal. 7

⁵ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, “*Manajemen Syariah dalam Praktiki*”, hal. 7

⁶ Akhmad, “*Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*”, (Yogyakarta: Pustaka AQ, 2019), hal. 55-74.

dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dirumuskan sebagai rencana keuangan. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa harus dianggarkan dalam APBD. Anggaran Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah Daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan Negara. Penggunaan Anggaran Belanja Daerah dilaksanakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan keuangan yang baik dan bentuk pertanggungjawaban keuangan seharusnya dilandaskan dengan prinsip syariah. Hal ini agar setiap kegiatan yang dilakukan mendapat ridho Allah Swt. Dalam prinsip ekonomi islam Allah Swt. telah menjelaskan banyak ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan umatnya serta larangan-larangan yang harus di patuhi dalam melaksanakan aktivitas ekonominya.

Penatausahaan keuangan daerah, dalam sistem dan prosedur pengelolaannya ditetapkan oleh masing-masing daerah. Perbedaan pengelolaan keuangan kemungkinan terjadi namun sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah maka hal tersebut di anggap wajar. Hal tersebut, diharapkan dapat menjadi dorongan bagi setiap daerah untuk lebih tanggap, kreatif, dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pembaharuan dalam sistem dan prosedurnya.

Dinas Peternakan dan Perkebunan merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas dalam bidang peternakan dan perkebunan khususnya di kabupaten Pinrang. Salah satu tugas dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perkebunan adalah penatausahaan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang peternakan dan perkebunan.

Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan atau program kerja yang telah dilaksanakan diharapkan dapat bersifat, transparansi atau terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, hal ini dimaksud agar dapat meningkatkan kinerja dari instansi itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa; dalam pertanggungjawaban APBD, maka pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan SKPD dengan meliputi, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan bentuk laporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana akuntabilitas sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan bentuk laporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana tinjauan manajemen keuangan syariah terhadap tingkat akuntabilitas sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan bentuk laporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan bentuk laporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
2. Untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan bentuk laporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan manajemen keuangan syariah terhadap tingkat akuntabilitas sistem penganggaran, mekanisme penggunaan anggaran dan bentuk laporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang manajemen khususnya pada bagian pengelolaan administrasi keuangan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa lainnya sebagai bahan referensi mengenai manajemen keuangan tentang pengelolaan administrasi keuangan serta dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi organisasi pemerintah ataupun instansi lain.

BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Kuncoro Thesaurianto Universitas Diponegoro tahun 2007 dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah transfer pemerintah pusat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya mengkaji dan menganalisis tentang sistem pengelolaan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terdapat pada variabel keduanya, penelitian yang dilakukan Kuncoro, meneliti tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap kemandirian daerah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya menganalisis pengelolaan administrasinya saja.

M. Abid Dzulfikar Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan keuangan sekolah yang diimplementasikan melalui RAPBSMA Negeri Se-Kabupaten Kendal dilakukan dengan adil dan mematuhi peraturan yang berlaku, realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah yang dilaporkan melalui laporan

⁷Kuncoro Thesaurianto, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*”, (Thesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2007).

Pertanggungjawaban APBSMA Negeri Se-Kabupaten Kendal dilakukan secara efisien dan mematuhi peraturan yang berlaku.⁸ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menganalisis tentang sistem pengelolaan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada metode penelitian, metode penelitian yang digunakan Abid menggunakan metode kuantitatif, sedangkan metode penelitian yang digunakan peneliti menggunakan metode kualitatif. Perbedaan yang lain terdapat pada studi atau objek penelitiannya, penelitian yang dilakukan Abid dilakukan di sekolah menengah atas (SMA) Negeri se-Kabupaten Kendal sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan pada instansi pemerintah.

Nurul Fadli Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2018 dengan judul Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah SMA Negeri 1 Bandar diawali dengan penyusunan RAKS dan RAB. Realisasi pengelolaan dan Bos juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah No.48 Tahun 2008 Pasal 59.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya meneliti tentang sistem pengelolaan keuangan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif sama dengan yang dilakukan peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadli

⁸ M. Abid Dzulfikar, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal*”, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015).

⁹ Nurul Fadli, “*Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah)*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

dilakukan di Sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di instansi pemerintah.

Herybertus Yudha Pradana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2018 dengan judul Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desan Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan di desa Jatimulyo sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun dalam perencanaan APBD Desa masih ada keterlambatan dalam memperoleh kesepakatan bersama. Kemudian dalam proses pelaksanaannya juga masih ada ketentuan yang belum sesuai. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif¹⁰. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya ingin menganalisis tentang sistem pengelolaan keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah pada objek penelitiannya. Perbedaan selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herybertus meneliti sistem Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak berlandaskan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Indah Sampurna, Universitas Brawijaya Malang tahun 2018 dengan judul Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif *Good Governence*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan

¹⁰ Herybertus Yudha Pradana, “*Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desan Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)*”.(Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mangliawan melalui tiga tahapan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran telah sesuai berdasarkan transaksi dan pembayaran nota dengan bukti realisasi anggaran yang ada di lapangan.¹¹ Persamaan penelitian yang dilakukan indah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya ingin mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam suatu pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan indah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yang dilakukan indah bertepatan pada kantor Desa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bertepatan pada kantor dinas. Perbedaan kedua penelitian yang dilakukan indah yaitu ingin mengkaji tentang akuntabilitas keuangan dalam perspektif *good governance*, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah akuntabilitas administrasi keuangan dengan berdasar kepada prinsip manajemen keuangan syariah.

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kuncoro Thesaurianto tahun 2007	Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya mengkaji dan menganalisis tentang sistem	penelitian yang dilakukan penulis adalah terdapat pada variabel keduanya, penelitian yang dilakukan Kuncoro, meneliti tentang pengelolaan keuangan daerah terhadap

¹¹ Indah Sampurna, "Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Good Governance", (Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2018).

			pengelolaan keuangan	kemandirian daerah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya menganalisis pengelolaan administrasinya saja
2	M. Abid Dzulfikar tahun 2015	Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri Se-Kabupaten Kendal	Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menganalisis tentang sistem pengelolaan keuangan.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada metode penelitian, studi atau objek penelitiannya, penelitian yang dilakukan Abid dilakukan di sekolah menengah atas (SMA) Negeri se-Kabupaten Kendal sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan pada instansi pemerintah.
3	Nurul Fadli Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh pada tahun 2018	Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya meneliti tentang sistem pengelolaan keuangan. Selain itu penelitian ini juga	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fadli dilakukan di Sekolah, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan di

			menggunakan metode kualitatif sama dengan yang dilakukan peneliti	instansi pemerintah
4	Herybertus Yudha Pradana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta tahun 2018	Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desan Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya ingin menganalisis tentang sistem pengelolaan keuangan	penelitian yang dilakukan oleh Herybertus meneliti sistem Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis tidak berlandaskan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
5	Indah Sampurna, Universitas Brawijaya Malang tahun 2018	Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif <i>Good Governance</i>	Persamaan penelitian yang dilakukan indah dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya ingin mengetahui tentang akuntabilitas pengelolaan	Perbedaan penelitian yang dilakukan indah dan penulis yaitu indah ingin mengkaji tentang akuntabilitas keuangan dalam perspektif <i>good governance</i> , sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah

			keuangan dalam suatu pemerintah daerah	akuntabilitas administrasi keuangan dengan berdasar kepada prinsip manajemen keuangan syariah
--	--	--	----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Tinjauan Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Accountabilty*” yang artinya keadaan untuk dipertanggungjawabkan, keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Secara Umum akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan pertanggungjawaban sebagai upaya untuk memenuhi tanggungjawab yang telah diserahkan kepadanya. Jika mengacu pada UU No. 7 Pasal 7 yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap penyelenggaraan atau kegiatan Negara harus memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat, karena masyarakat adalah pemegang kedaulatan tertinggi Negara berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) tahun 2003 mengatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan hukum/pimpinan/kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta

¹² Indah Sampurna, “*Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Good Governance*”, (Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2018), hal. 30

pelaksana kebijakan yang dipercayakan kepada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.¹³ Sony Yuwono dkk, menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik yang memiliki makna bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat.¹⁴

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan anggaran baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat.

b. Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas variabel, merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi atau pemerintah desa mempertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
2. Akuntabilitas horizontal, merupakan suatu bentuk kegiatan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas pengelolaan atau penggunaan dana.¹⁵

Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa akuntabilitas terbagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

¹³ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010” Lampiran II.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah, hal. 7

¹⁴ Sony Yuwono, dkk, “Penganggaran sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)”, (Malang, Buyamedia Publishing, 2005), hal. 59

¹⁵ Mardiasmo, “Akuntansi Sektor Publik”, (Jakarta: Binus University, 2016), hal. 78-79

1. Akuntabilitas keuangan, atau tanggungjawab terkait masalah keuangan, inspeksi, dan seberapa jauh pihak bisa menaati peraturan yang sudah disepakati.
2. Akuntabilitas manfaat, atau akuntabilitas ditinjau dari hasil kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah.
3. Akuntabilitas prosedural, adalah tanggungjawab terkait apakah suatu kebijakan yang diselenggarakan sudah mempertimbangkan aspek moral, hukum, etika, aspek politisi tertentu.¹⁶

c. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Koppel terdapat lima dimensi dari akuntabilitas diantaranya terdiri dari:

1. Transparansi adalah nilai literal dari akuntabilitas; gagasan bahwa sebuah organisasi yang bertanggungjawab harus menjelaskan tindakannya.
2. Kewajiban melampirkan kesalahan dari transparansi. Dalam pandangan ini, individu dan organisasi harus bertanggungjawab atas tindakan mereka, dihukum karena penyimpangan, dan diberi penghargaan atas kesuksesan.
3. Pengawasan yang merupakan konspeksi akuntabilitas yang dominan.
4. Tanggungjawab berarti bahwa orang dan organisasi dibatasi oleh undang-undang, peraturan, dan norma.
5. Responsivitas adalah perhatian organisasi terhadap ekspresi langsung dari kebutuhan dan keinginan konstituen atau pelanggan sebuah organisasi.¹⁷

Menurut Rasul terdapat 5 dimensi akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Wahyudi, "Akuntabilitas Instansi Pemerintah", (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2011), hal. 11

¹⁷ Jonathan Kopel GS, "Pathologies of Accountability, ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities", (Disordes Public Administration, 2005), Hal. 96

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas ini terkait dengan diterapkannya kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang lain yang telah diatur dengan organisasi atau lembaga akuntabilitas kejujuran terkait dengan perilaku menghindari penyalahgunaan terhadap jabatan dan korupsi. Pada akuntabilitas hukum, menjadi hal yang harus ditegakkan sedangkan pada akuntabilitas kejujuran adanya jaminan terhadap praktik organisasi yang baik dan sehat.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas ini berkaitan dengan kinerja dan yang harus dipertanggungjawabkan yaitu pengelolaan secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas ini diartikan bahwa program yang dirancang dalam suatu organisasi diharapkan berupa program yang berkualitas serta mendukung untuk terwujudnya visi, misi serta tujuan dari organisasi. Organisasi atau lembaga publik harus mampu mempertanggungjawabkan program yang telah dirancang sampai pada tahap pelaksanaannya.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntansi Kebijakan diharapkan seluruh lembaga politik dapat mempertanggungjawabkan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan dan selalu mempertimbangkan dampak yang mungkin akan terjadi di masa depan.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas ini berfokus pada pertanggungjawaban lembaga atau organisasi publik dalam penggunaan dana publik (*Public Money*). Apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif, efisien dan dapat dipastikan tidak ada kebocoran dana atau

pemborosan serta korupsi. Pada akuntabilitas finansial ini, setiap lembaga publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan sebagai gambaran kinerja finansial organisasi kepada para *stockholder*.¹⁸

2. Administrasi Keuangan

a. Pengertian Administrasi Keuangan

Administrasi diambil dari kata “*ad*” dan “*ministro*”. *Ad* mempunyai arti “kepada” dan *ministro* berarti “melayani. Sehingga administrasi diartikan sebagai pelayanan atau pengabdian terhadap subjek tertentu. Administrasi juga berasal dari kata *administrate* yang artinya kegiatan penyusunan dan pencatatan. Kegiatan ini mencakup kegiatan tulis-menulis, mengirim dan menyimpan keterangan.¹⁹

Menurut Silalahi, Administrasi keuangan merupakan penyusunan dan pencatatan data atau informasi dengan sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Jadi administrasi keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pemeriksaan, penganggaran, pengendalian, pengelolaan dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh orang atau perusahaan.

b. Ruang Lingkup Administrasi Keuangan

1. Administrasi Keuangan Bulanan

Pembukuan atau akuntansi (*Controler*) yang mempunyai fungsi pokok (*Recording*) dan membuat laporan (*Reporting*) tentang keuangan suatu perusahaan dalam periode bulanan.

¹⁸ Mardiasmo, “*Akuntansi Sektor Publik*”, (Yogyakarta: Andi, 2009), hal. 41

¹⁹ H. Asep Kartiwa, “*Metode Penelitian Administrasi*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 15

2. Administrasi Keuangan Tahunan

Pembukuan atau akuntansi (*Controler*) yang mempunyai fungsi pokok (*Recording*) dan membuat laporan (*Reporting*) tentang keuangan suatu perusahaan dalam periode tahunan.²⁰

c. **Komponen Administrasi Keuangan**

Beberapa komponen dalam administrasi keuangan antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan keuangan
2. Pengelolaan keuangan
3. Penganggaran keuangan
4. Pencarian keuangan
5. Pengendalian keuangan
6. Penyimpanan keuangan
7. Pemeriksaan keuangan

3. Laporan Keuangan

a. **Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi meliputi dua laporan yaitu neraca dan laba rugi, yang disusun dengan tujuan untuk penyedia informasi keuangan pada perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan.²¹ Menurut Kasmir, laporan keuangan merupakan laporan yang dapat

²⁰ Silalahi, “*Studi Tentang Ilmu Administrasi*” (Cetakan Kelima; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2003), hal. 5

²¹ Sutrisno, “*Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi*”, (Yogyakarta: Ekomisia, 2012), hal. 9

menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan yang terjadi saat ini atau periode yang akan datang.²²

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang dapat memberikan segala informasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan untuk memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pihak luar atau inverstor untuk dijadikan bahan pertimbangan penginvestasian hartanya.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan dalam buku standar akuntansi keuangan (SAK) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi kinerja keuangan serta perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemakai dalam pengambilan keputusan.
2. Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan.
4. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan netto dari kekayaan sebagai hasil dari aktivitas usaha.
5. Memberi informasi tentang kinerja perusahaan dalam suatu periode.²³

²² Kasmir, “*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Hal. 7.

²³ Standar Akuntansi Keuangan (SAK), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 10.

c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir, laporan keuangan terbagi menjadi 5 macam, diantaranya yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan neraca biasa terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Laporan neraca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena di dalamnya terdapat informasi terkait siapa pemegang saham, kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada dan berbagai kebijakan lainnya.

2. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan

3. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi laporan ini tentang data-data sumber pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas atau biasa disebut sebagai *cashflow* diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang memberikan informasi apabila ada laporan keuangan yang memerlukan penjelasan tertentu.²⁴

d. Sifat Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki dua sifat yaitu:

- a. Historis, bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu.
- b. Menyeluruh, laporan keuangan dibuat dan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.²⁵

4. Anggaran

a. Pengertian Anggaran

Menurut Rudianto, anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa depan atau masa yang akan datang yang diwujudkan secara kuantitatif, formal dan sistematis. Proses penyiapan anggaran disebut sebagai penganggaran.

Rencana kerja dalam suatu perusahaan ditulis dalam bentuk sederetan angka yang merupakan target pencapaian perusahaan. Hal ini dimaksud untuk memudahkan anggota organisasi melihat target yang ingin dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu. Langkah-langkah positif harus diambil oleh organisasi atau perusahaan dalam merealisasikan apa yang direncanakan di dalam anggaran. Anggaran harus dapat dilihat dan di komunikasikan kepada seluruh anggota organisasi untuk menjadikan target yang harus dicapai oleh anggota perusahaan. Anggaran juga harus disusun secara sistematis untuk mempermudah anggota organisasi memahami target yang harus dicapai perusahaan.

²⁴ Kasmir, *“Pengantar Manajemen Keuangan”*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hal. 28

²⁵ Kasmir, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Hal. 12-16

b. Ciri-Ciri Anggaran

Anggaran memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan sekedar rencana, antara lain:

1. Dinyatakan dalam satuan moneter. Penulisan dalam satuan moneter dapat didukung dengan satuan kuantitatif lain, misalnya unit. Penyusunan rencana kerja yang diwujudkan dalam suatu cerita yang panjang akan menyulitkan anggota organisasi dalam membacanya. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dalam bentuk kuantitatif moneter yang ringkas dapat mempermudah pembaca untuk memahaminya.
2. Mengandung komitmen manajemen. Anggaran harus disertai dengan upaya pihak manajemen dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Tanpa upaya dari pihak manajemen maka penyusunan anggaran tidak akan banyak manfaatnya bagi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun telah realistis.
3. Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun.
4. Usulan anggaran harus disetujui pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran.
5. Setelah disetujui, anggaran hanya akan diubah jika dalam keadaan khusus. Tidak setiap saat dalam segala keadaan anggaran dapat diubah oleh manajemen. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal memaksa, karena jika tidak diubah maka akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada.

6. Harus dianalisis penyebabnya, jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari sebab penyimpangan, agar hal tersebut tidak terulang lagi di masa yang akan datang dan dapat membuat penyusunan anggaran di kemudian hari lebih relevan dengan situasi yang ada.

c. Fungsi Anggaran

Menurut Rudianto, anggaran memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai berikut:

1. Alat perencana

Alat perencana sebagai bahan dari fungsi perencanaan (*planning*), anggaran merupakan rencana kerja yang menjadi pedoman bagi para anggota organisasi dalam bertindak. Anggaran memberikan sasaran dan arah yang harus dicapai dalam suatu organisasi dalam satu periode tertentu. Tanpa adanya anggaran, perusahaan tidak memiliki arah dan sasaran yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu.

Anggaran memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
- b. Mendorong seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
- c. Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.
- d. Mengakan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.

2. Alat pengendalian

Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dalam hal ini anggaran berfungsi sebagai standar atau tolak ukur manajemen. Jika realisasi pelaksanaan setiap bagian manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa bagian tersebut berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan. Dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Berperan sebagai tolak ukur atau standar manajemen.
- b. Untuk menilai dan mengevaluasi setiap segi dan aspek organisasi secara sistematis.
- c. Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaah terhadap masalah yang dihadapi.²⁶

5. Manajemen Keuangan Syariah

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen secara etimologi berarti kepemimpinan; proses pengaturan; Menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya.²⁷ Menurut G.R Terry, manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.²⁸

Manajemen dalam bahasa Arab disebut sebagai *Idarah*. *Idarah* diambil dari kata *adartasy-syai* atau perkataan *adarta bihi* dan juga dapat didasarkan pada kata *ad-*

²⁶ Rudianto, “*Penganggaran*”, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 20

²⁷ Rusdiana, “*Manajemen Konflik*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 169

²⁸ Mwlayu S.P Hasibuan, “*Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*” (Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

dauran. Dalam *Elias Modern Dictionary English Arabic* kata *Management* sepadan dengan kata *tabdir*, *idarah*, *siyasah*, dan *qiyadah* dalam bahasa arab. *Tabdir* adalah bentuk masdar dari kata kerja *dabbara*, *yadabbiru*, *tabdiran* y*Tabdir* yang berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. *Idarah* (Manajemen) adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.²⁹ Jadi, manajemen syariah adalah kegiatan manajerial untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Manajemen keuangan adalah gabungan ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan yang ada guna mencari dana, mengelola dana, serta membagi dana agar mampu memberikan profit atau laba dan kemakmuran para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan.³⁰

Teori diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen keuangan syariah adalah penggabungan ilmu dan seni yang membahas mengenai perencanaan, pengorganisasian, pengendalian keuangan yang berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah.

²⁹ H. Dadang Husen, "*Manajemen Keuangan Syariah I*", (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 15-16

³⁰ Fahmi, "*Pengantar Manajemen Keuangan*", (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 2

b. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

1. Prinsip manajemen keuangan syari'ah yang diajarkan Al-Qur'an.
 - a. Setiap perdagangan harus didasari sikap saling rida atau atas dasar suka sama suka.
 - b. Penegakan prinsip keadilan, baik dalam takaran, timbangan, ukuran mata uang, maupun pembagian keuntungan.
 - c. Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal.
 - d. Prinsip larangan riba
 - e. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (Shalat dan Zakat) dan mengingat Allah.³¹
2. Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syari'ah

Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syariah dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Larangan riba

Larangan riba dalam istilah berarti kelebihan dan ditafsirkan sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dari sistem keuangan syariah.

- b. Uang sebagai modal potensial

Uang diperlukan sebagai modal potensial menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan produktif. Islam mengakui nilai waktu adalah uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

³¹ Zainal Arifin, "Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah", (Bandung: Alfabeta, 2010) hal.

c. Larangan perilaku spekulatif

Sistem keuangan syariah melarang penimbunan dan transaksi yang melibatkan ketidakpastian ekstrem, perjudian dan resiko.

d. Keadilan sosial

Pada prinsipnya, setiap transaksi yang mengarah ketidakadilan dan eksploitasi adalah dilarang.³²

6. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Dalam Islam

Mengelola keuangan adalah tentang bagaimana cara mengatur uang yang didapatkan untuk mencukupi segala kebutuhan. Sedangkan merencanakan keuangan adalah tentang strategi bagaimana mencapai tujuan keuangan di masa depan dengan kondisi keuangan yang dimiliki saat ini.

Al-Qur'an sering kali disebut sebagai sumber utama (pertama) dan Hadist sebagai sumber kedua ajaran Islam. Posisi Al-Qur'an sebagai petunjuk tentunya tidak hanya dalam ibadah tetapi juga sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan lainnya, membina rumah tangga dan juga termasuk di dalamnya dalam pengelolaan keuangan. Allah SWT. Berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26-27:

Surat Al-Isra Ayat 26

وَأَاتِ ذَا الْفُرْقَيْنِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Wahai orang yang beriman! Berikanlah hak kerabatmu berupa ikatan silaturahmi, juga berilah bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan, dan orang

³² Dadang Husen, "Manajemen Keuangan Syariah", (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal. 21-

yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan janganlah sekali-kali menggunakan hartamu dalam kemaksiatan, atau menghambur-hamburkannya secara boros. (Tafsir al-Mukhtashar).³³

Surat Al-Isra Ayat 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*³⁴

Sesungguhnya orang yang melakukan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat Tuhannya. (Tafsir al-Muyassar).

Pengelolaan keuangan sesuai dengan Al-Quran sebaiknya disertakan Zakat, Infaq, Sedekah. Dalam mengelola bisnis tidak diperkenankan sama sekali untuk mendiskriminasi kaum miskin. Pengelolaan keuangan yang baik sebaiknya tidak berlebihan atau menghambur-hamburkan.³⁵

7. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD di susun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan pemerintah

³³ Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-26-27.html>

³⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁵ Himmah Mu'minah, "Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang)" (Skripsi: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2019), hal. 34

daerah. Pemerintah melaksanakan kegiatan keuangan dalam siklus pengelolaan anggaran yang terdiri dari:

- a. Penyusunan dan Penetapan APBD
- b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD
- c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD.

Pemerintah daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Maka kesesuaian antara kewenangan pemerintah dan sumber pendanaan perlu diperhatikan. Pengaturan kesesuaian kewenangan dengan pendanaan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari atas beban APBD
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah di danai dari dan atas beban APBN
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi yang penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota atau desa, di danai dari atas beban APBD provinsi
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah kabupaten/kota yang penugasannya dilimpahkan kepada desa, d idanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangun dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Setelah rencana kerja ditetapkan, perlu penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (SKPD) yang menjadi acuan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) SKPD. Selanjutnya berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS).

Nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya. Selanjutnya berdasarkan RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dilakukan pembahasan penyusunan Raperda oleh TAPD. Pembahasan ini dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja, indikator, kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belanja daerah dimasukkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Rinciannya dibagi menjadi 2 bentuk yaitu berdasarkan sifatnya dan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan sifat ekonominya belanja daerah terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya belanja daerah terdiri dari belanja pembangunan perumahan dan fasilitas umum, peningkatan kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan dan perlindungan sosial.

Belanja menurut urusan pemerintah yang penanganannya dalam bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Pada pasal 36 mengatakan bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.³⁶

C. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seorang/badan

³⁶ Akhmad, "*Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*", (Yogyakarta: Pustaka AQ, 2019), hal. 55-74.

hukum/pimpinan/kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³⁷

2. Administrasi Keuangan

Administrasi keuangan merupakan penyusunan dan pencatatan data atau informasi dengan sistematis untuk menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperolehnya kembali secara keseluruhan.³⁸ Administrasi keuangan juga merupakan suatu kegiatan perencanaan, pengendalian, pemeriksaan, penganggaran, pengelolaan dan penyimpanan dana yang di miliki seseorang atau perusahaan.

3. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi meliputi dua laporan yaitu neraca dan laba rugi, yang disusun dengan tujuan untuk menyedia informasi keuangan pada perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan³⁹ oleh pihak yang memiliki kepentingan.

4. Anggaran

Anggaran merupakan rencana kerja organisasi di masa depan atau masa yang akan datang yang diwujudkan secara kuantitatif, formal dan sistematis.⁴⁰

5. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah gabungan ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan

³⁷ Indah Sampurna, “Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Perspektif Good Governance”, (Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2018), hal. 30

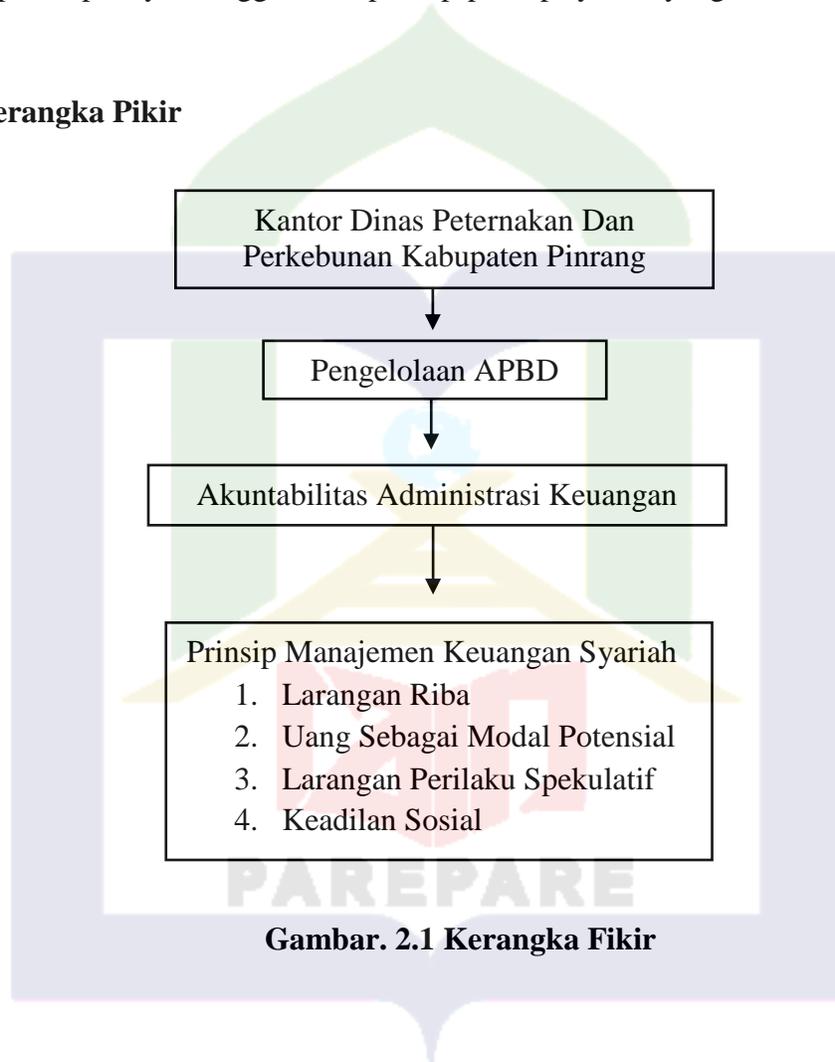
³⁸ Silalahi, “Studi Tentang Ilmu Administrasi” (Cetakan Kelima; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2003), hal. 5

³⁹ Sutrisno, “Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi”, (Yogyakarta: Ekomisia, 2012), hal. 9

⁴⁰ Rudianto, “Penganggaran”, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 20

mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan guna mencari dana, mengelola dana, serta membagi dana agar mampu memberikan profit atau laba dan kemakmuran para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan⁴¹ yang mana di dalam penerapannya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

D. Kerangka Pikir



Gambar. 2.1 Kerangka Fikir

⁴¹ Fahmi, “*Pengantar Manajemen Keuangan*”, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 2

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti seperti apa gejala sentral tersebut peneliti melakukan wawancara kepada narasumber atau partisipan dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum dan agak luas.⁴²

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang, Jl. Poros Pinrang-Parepare Km.6 Bulu Kelurahan Manarang Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih sekitar 2 bulan lamanya disesuaikan dengan data-data yang dikumpulkan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini terfokus bagaimana sistem pengelolaan administrasi keuangan yang diterapkan di Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan dan memaparkan hasil dari penelusuran yang didapatkan peneliti.

D. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang

⁴² Josef Raco, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hal. 53

kenyataan melalui proses berfikir induktif.⁴³ Data yang diperlukan berupa laporan keuangan dari kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden. Data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi langsung dengan meminta informasi atau keterangan pada pimpinan dan bagian atau unit pengelolaan keuangan di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara.⁴⁴ Data sekunder diperoleh dari data yang sudah jadi misalnya arsip dari kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang. Selain itu data juga diperoleh dari penelitian terdahulu literatur, jurnal dan buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data-data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan metode:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Loncoln dan Guba, maksud

⁴³ Basrowi dan Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009), hal. 1

⁴⁴ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi*”, (Mixed Methods), hal. 187

diadakannya wawancara adalah untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan di masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik manusia maupun bukan manusia. Dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti sebagai pengecekan anggota.⁴⁵

Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁴⁶ Dalam hal ini wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu bertemu langsung dan melakukan tanya jawab dengan pimpinan atau bagian unit pengelolaan keuangan di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam suatu penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini data yang diambil adalah sejarah perusahaan/kantor, struktur organisasi, tugas dan wewenang, jumlah karyawan dan laporan keuangan kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

⁴⁵ Basrowi dan Suwandi, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2009), hal. 127

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: PT Rineka Salemba Empat, 2004), hal. 323

⁴⁷ Musaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, "*Metode penelitian Sosial*", (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan perlu dilakukan agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah. Adapun uji keabsahan yang dilakukan adalah:

1. Uji *Credibility*

Uji *Credibility* (Kredibilitas) adalah uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebuah karya ilmiah yang dilakukan.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu metode dalam memilah dan mengelola sebuah data menjadi informasi, sehingga data menjadi mudah untuk dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk pemecahan masalah dalam penelitian sehingga bisa mengambil kesimpulan.⁴⁹

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang cukup banyak perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Semakin lama penelitian di lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilah hal-hal-hal yang penting, dengan demikian direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan juga dapat mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data, dan mencarinya bila diperlukan.

⁴⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*", (Bandung: Alfabeta, 2007). Hal. 10-12

⁴⁹ Sugiyono, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 277

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penelitian kualitatif pada penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian kategori singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi. Melalui analisis data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing/Verivication*

Menurut Miles and Huberman Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik simpulan atau Verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁵⁰

⁵⁰ Sugiyono, “*metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 246-249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dinas Peternakan dan Perkebunan

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Pinrang Nomor 46 tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang dengan tugas melaksanakan sebagian wewenang urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan perkebunan yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengembangan produksi dan agribisnis peternakan dan perkebunan;
- b. Penetapan pembinaan teknis pengembangan usaha dan sumber daya peternakan dan perkebunan;
- c. Penetapan pembinaan teknis pengembangan usaha dan sumber daya peternakan dan tanaman perkebunan;
- d. Perumusan dan penetapan pedoman penanggulangan dan pengendalian penyakit ternak dan hama pengganggu dan penyakit tanaman perkebunan;
- e. Penetapan pedoman penerapan dan pengembangan teknologi serta spesifikasi alat/mesin peternakan dan perkebunan mendukung sarana dan prasarana bidang peternakan dan perkebunan;

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- b. Meningkatkan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian
- c. Meningkatkan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB sektor pertanian
- d. Meningkatkan aplikasi teknologi terapan spesifik lokasi dalam pembangunan peternakan dan perkebunan

B. Sistem Dan Mekanisme Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang

Anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang termasuk di dalamnya belanja langsung dan belanja tidak langsung yang diberikan langsung oleh pemerintah setempat melalui sistem aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) 2020.

Pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara, penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1. Sistem Dan Tahapan Perencanaan Anggaran Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).⁵¹ Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tahap pertama dalam penganggaran dilakukan mulai dari beberapa proses yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan RENSTRA (Rencana Strategis)

Rencana Strategi (RENSTRA) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. RENSTRA juga diartikan sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

RENSTRA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara

⁵¹ Akhmad, "*Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*", (Yogyakarta: Pustaka AQ, 2019), hal. 56

sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui feedback yang sistematis.

Kedudukan Renstra Dinas Peternakan Dan Perkebunan sangatlah penting artinya bagi semua stake holder lingkup peternakan dan perkebunan karena merupakan pedoman yang akan dipergunakan oleh semua komponen pelaku pembangunan khususnya peternakan dan perkebunan, selain itu para pelaku pembangunan lainnya dapat lebih mudah untuk saling mensinergikan program dan kegiatan yang Dilaksanakan Untuk Mewujudkan Visi Dan Misi Kabupaten Pinrang.

Penyusunan Renstra Dinas Peternakan Dan Perkebunan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan dengan menggali masukan-masukan dari intern dinas peternakan dan perkebunan kemudian dirangkum menjadi rancangan awal Renstra. Rancangan awal Renstra tersebut selanjutnya dimusyawarahkan dan didiskusikan dalam Forum Group Discussion yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di kabupaten Pinrang untuk menjangring kebutuhan masyarakat dan strategi mengembangkan dunia usaha peternakan dan perkebunan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Sehingga dari hasil musyawarah tersebut kemudian dirumuskan menjadi rancangan akhir Renstra yang akan ditetapkan menjadi Renstra Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

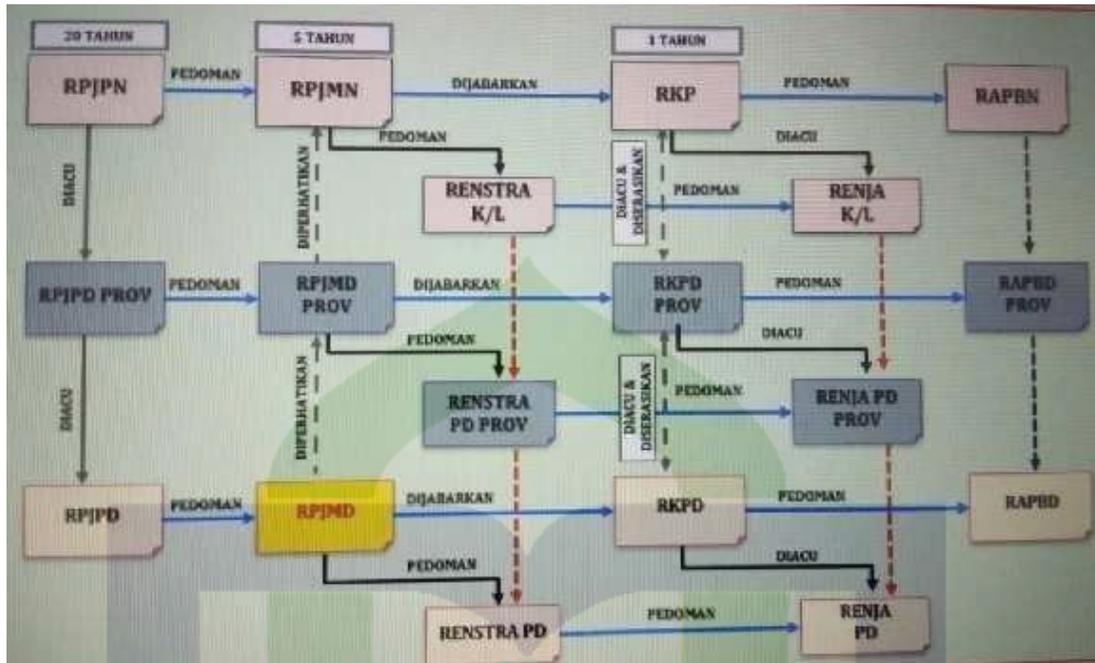
Renstra Dinas Peternakan Dan Perkebunan selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen operasional tahunan yaitu dokumen Rencana Kerja OPD (RENJA OPD) yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja

dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si dalam wawancara yang dilakukan di kantor Dinas Peternakan dan perkebunan yang menyatakan bahwa:

Tahapan penganggaran pertama dilihat dari Renstra (Rencana Strategi), kemudian Renstra dijabarkan lagi menjadi Renja (Rencana Kerja), Renstra merupakan rencana strategi dengan jangka waktu 5 tahun yang termuat program-program dari semua bagian yang ada pada dinas Peternakan dan Perkebunan, sedangkan Renja merupakan rencana kerja tahunan atau setiap 1 tahun. Pada Renja tergambar semua jenis penganggaran mulai dari tahapan, penyusunan, pengusulan, rancangan dan sampai tahap pencarian. Dalam menetapkan Renstra dan Renja diadakan yang namanya MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang melibatkan semua bagian dan sub bagian yang ada pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan untuk membahas tentang program-program yang akan dijalankan, kegiatan-kegiatan sampai dengan sub kegiatan.⁵²

Dokumen-dokumen perencanaan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pinrang tahun 2009-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (*dalam proses*), dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Tahun 2019-2024 (*dalam proses*) merupakan dokumen yang saling terkaitan, selanjutnya keterkaitan Dokumen Renstra dengan dokumen-dokumen lainnya, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah.

⁵² Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022



Gambar 4.1 sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional

Tatanan proses operasional setiap tahunnya Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perkebunan menjadi dasar atau acuan penentuan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis ini merupakan salah satu materi yang akan dibahas dalam MUSRENBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) setiap tahun, untuk diselaraskan dengan aspirasi masyarakat dalam rangka penyempurnaan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

b. Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Tahap selanjutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Renja Perangkat Daerah diawali dengan melakukan persiapan penyusunan Renja, meliputi penyusunan rancangan keputusan kepada daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja PD, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya penyusunan rancangan awal (Ranwal) Renja Perangkat Daerah.

Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Selanjutnya Renja OPD dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang.

Setelah penyusunan Rencana strategi dan rencana kerja selanjutnya Renstra dan Renja yang telah ditetapkan diajukan ke BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan keuangan untuk di proses. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si dalam wawancara yang dilakukan di kantor Dinas Peternakan dan perkebunan yang menyatakan bahwa:

Proses penganggaran didasarkan kepada Renstra dan Renja yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi atau kantor dinas, kemudian Renstra dan Renja tersebut itulah yang didorong ke BAPPEDA dan keuangan untuk menunjukkan bahwa sekian anggaran yang dibutuhkan di OPD ini, setelah

semua anggaran secara keseluruhan cair maka anggaran tersebut akan dijabarkan ke kegiatan-kegiatan yang telah rancang pada setiap bagian.⁵³

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran Berdasarkan Rencana Kerja

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan berfokus kepada Peternakan dan Perkebunan yang berkelanjutan, berdaya saing dan berkualitas tinggi karena produk peternakan dan perkebunan merupakan kebutuhan yang sangat penting dibandingkan dengan kebutuhan lainnya sehingga membutuhkan dana yang lebih untuk menunjang kegiatan tersebut. Untuk programnya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi Peternakan dan Perkebunan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan petani dan peternak serta kesejahteraan petani. Memanfaatkan serta mengoptimalkan IPTEK yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi peternak dan petani sekaligus mendukung peningkatan kualitas peternakan dan perkebunan serta pengembangan sumber daya manusia.

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si di kantor dinas peternakan dan perkebunan menyatakan bahwa :

Setelah proses pencairan anggaran yang diberikan berdasarkan Renstra dan Renja yang telah diajukan, semua bagian yang ada pada Dinas Peternakan dan Perkebunan mulai menjalankan kegiatannya sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh masing-masing bagian. Rencana kerja ini mulai dari kegiatan fisik sampai dengan anggarannya. Kegiatan fisik yang dimaksud di sini seperti pembangunan jalan produksi, sumur dalam, pembangunan jalan tani, dan infrastruktur pendukung lainnya baik yang ada di kantor maupun luar kantor.⁵⁴

Pernyataan diatas dapat di simpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap kantor berdasar kepada Rencana Kerja yang telah ditetapkan,

⁵³ Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

⁵⁴ Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

adapun pembagian dari kegiatan tersebut di turunkan lagi ke rencana kerja yang telah di susun oleh setiap bagian dari struktur organisasi yang ada pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bagian dan tetap melalui jalur koordinasi yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa jumlah program dan jumlah kegiatan Dinas Peternakan dan Perkebunan meliputi:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1. Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
 - b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisari realisasi capaian kerja
 - g. Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b. Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - c. Pelaksanaan penatausahaan dan pengajuan/verifikasi keuangan SKPD
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - e. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - b. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - c. Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
 - d. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan/komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Penyediaan bahan cetak dan penggandaan
 - d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - e. Penyediaan bahan material
 - f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
6. Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan mebel
 - b. Penggandaan peralatan dan mesin lainnya
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya

Program Penyediaan Barang Dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - a. Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan Dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman
 - b. Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
 - c. Pemanfaatan SDG hewan tanaman
3. Peningkatan Mutu Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan/pakan/tanaman skala kecil
 - b. Pengawasan peredaran bahan/pakan, benih bibit hijauan pakan ternak
4. Pengendalian Dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak
 - b. Pengawasan produksi benih bibit ternak dan HPT, bahan pakan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan Dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Kabupaten/Kota

- a. Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan Dan Zoonosis
- b. Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengawasan, Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penilaian Resiko Penyakit Hewan Dan Keamanan Produk Hewan
 - b. Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium Dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
 - b. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
 - c. Penerapan Dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Pendampingan Unit Usaha Hewan Dan Produk Hewan

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - a. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

Program Penyuluhan Pertanian

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - a. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

Sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Peternakan Dan Perkebunan adalah meningkatnya sumber daya peternakan dan perkebunan, yang dimaksud dalam hal itu adalah jumlah produksi peternakan yang dihitung dalam ekor selama satu tahun dan

perkebunan yang dihitung dalam ton selama satu tahun. Sasaran ini dimaksud untuk mewujudkan peningkatan peternakan dan perkebunan di kabupaten Pinrang.

Berikut adalah beberapa pelaksanaan rencana kerja dan target indikator kinerja serta capaian produksi yang telah dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perkebunan.

Tabel 4.1
Capaian Per Indikator Sasaran Tahun 2021 Dinas Peternakan Dan Perkebunan

No	Indikator	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	% Realisasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Populasi Sapi	29.187,99	31.800	109	Melampaui Target
2	Jumlah Populasi Kambing	45.500,36	39.194	86	Belum Mencapai Target
3	Jumlah Populasi Ayam Ras Petelur	1.198.264,70	1.381,264	116	Melampaui Target
4	Jumlah Populasi Ayam	388,542,34	4,586,58	188	Melampaui Target
5	Jumlah Populasi Itik	1.427.526,83	1.316,150	95	Sesuai Target
6	Jumlah Ton Produksi Daging	1.465,72	1.024,482	73,5	Belum Mencapai Target
7	Jumlah Ton Produksi Telur	28,032,08	20.064,58 8	75	Belum Mencapai Target
8	Jumlah Ton Produksi Kakao	12,493,96	11,099,00	96	Sesuai Target
9	Jumlah Ton Produksi Kopi	3.275,26	2.868,00	95	Sesuai Target
10	Cakupan Bina Kelompok Tani	14 %	14%	100	Sesuai Target

Tabel diatas secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan atau rencana kerja yang telah ditetapkan Dinas Peternakan dan Perkebunan berjalan

dengan baik walaupun ada beberapa yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini akan membuat Dinas Perkebunan dan Peternakan dapat lebih meningkatkan lagi kinerja dan rencana kerja yang akan disusun ke depannya.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dinas perkebunan dan peternakan bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi Peternakan dan Perkebunan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, selain dari beberapa program di jalankan diatas dinas peternakan dan perkebunan juga memberikan dana hibah kepada masyarakat tani yang membutuhkan.

Dana hibah merupakan salah satu belanja daerah yang termasuk dalam belanja tidak langsung. Dalam UU pasal 42 dikatakan bahwa: belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.⁵⁵

Pemberian dana hibah dari kantor dinas peternakan dan perkebunan kepada masyarakat juga dinilai dari kebutuhan para peternak atau petani lainnya. Dana hibah yang dikeluarkan berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh masyarakat atau para petani dan peternak. Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si.

Belanja hibah atau belanja persediaan yang diserahkan langsung ke masyarakat berupa barang tergantung dari kebutuhan masyarakat atau petani dan peternak contohnya bibit, alat-alat pangkas dan alat-alat penunjang lainnya, belanja hibah diserahkan berdasarkan proposal yang diajukan, namun dalam pengajuan proposal kita juga memilah mana masyarakat yang layak mendapat bantuan atau dana hibah tersebut.⁵⁶

⁵⁵ Akhmad, "*Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*", (Yogyakarta: Pustaka AQ, 2019), hal. 144

⁵⁶ Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

Dana hibah yang telah diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat menunjang dan membantu kegiatan para petani dan peternak untuk mendapatkan hasil tani dan ternak yang baik dan sehat.

3. Tahap Pelaporan Pertanggungjawaban Anggaran Rencana Kerja Berdasarkan Laporan Keuangan

Setelah tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan tahap selanjutnya adalah pelaporan pertanggungjawaban baik berupa anggaran maupun berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai prinsip-prinsip akuntansi dengan berdasar kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang menyusun laporan keuangan per 31 Desember yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan keuangan per 31 Desember berbasis akrual.

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang per 31 Desember 2020 adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Penyusunan laporan keuangan di susun sesuai dengan sistematika penyusunan dan penulisan laporan keuangan yang telah di tetapkan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang di jabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan pos-pos neraca

5.2 Penjelasan pos-pos laporan keuangan realisasi anggaran

5.3 Penjelasan pos-pos laporan operasional

5.4 Penjelasan laporan perubahan ekuitas

5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

Bab VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

Bab VII Penutup

Pelaporan keuangan pemerintah daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPS disusun dan disajikan paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Neraca, c) Laporan Operasional, d) Laporan Perubahan Ekuitas, d) Catatan atas laporan keuangan.

Berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi anggaran dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang tahun 2021.

Tabel 4.2
Anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program dan kegiatan tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Belanja	8.690.753.496	8.004.107.489
Belanja tidak langsung	5.002.366.496	4.420.952.069

Belanja langsung	3.688.387.000	3.583.155.420
TOTAL	8.690.753.496	8.004.107.489

Tabel di atas dapat diketahui bahwa jenis belanja yang ada pada kantor dinas peternakan dan perkebunan terbagi atas belanja langsung dan tidak langsung. Belanja tidak langsung anggaran tahun 2021 sejumlah Rp. 5.002.366.496 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.420.952.069. sedangkan belanja langsung anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 3.688.387.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.583.155.420.

Laporan pertanggungjawaban kantor dinas peternakan dan perkebunan terbagi menjadi 4 bagian yaitu: laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan keuangan semesteran, dan laporan keuangan per 5 tahun. Hal ini dikatakan langsung oleh Ibu Hajrah S.P selaku Kasubag Keuangan pada kantor dinas peternakan dan perkebunan bahwa:

Laporan keuangan pada kantor Dinas dan Peternakan terbagi menjadi laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan per 5 tahun, dan dilaporkan sesuai progres yang telah dikerjakan atau dilakukan. Kemudian progres kegiatan terbagi menjadi 2 yaitu progres kegiatan fisiknya dan progres anggarannya.⁵⁷

Laporan keuangan dibuat berdasarkan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan juga ditulis dengan kebijakan akuntansi neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos yaitu: kas dan setara kas, investasi

⁵⁷ Hajrah, SP., Kasubang Keuangan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kebijakan jangka pendek, kebijakan jangka panjang, dan ekuitas dana.

Tahap penyampaian laporan keuangan dilakukan berdasarkan jalur koordinasi yang telah ditetapkan. Laporan keuangan di sampaikan berdasarkan hasil kegiatan dan penggunaan anggaran yang telah dilakukan atau dijalankan laporan keuangan disampaikan berdasarkan jenis laporan keuangan yaitu bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan keuangan per 5 tahun.

Laporan keuangan yang telah dibuat kemudian dilaporkan ke Bupati Pinrang melalui Badan Keuangan Daerah (BKUD) melalui aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah). Hal ini di sampaikan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Hajrah S.P selaku Kasubag Keuangan pada kantor dinas peternakan dan perkebunan bahwa:

Laporan pertanggungjawaban dari keseluruhan dinas yang dinamakan laporan kinerja instansi pemerintahan yang disampaikan kepada Bupati Pinrang melalui Badan Keuangan Daerah (BKUD), laporan keuangan lainnya juga di sampaikan ke ULP dan Bappeda sesuai progres kegiatan dan waktu pelaporan keuangan. Laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban di rampungkan dan di muat di aplikasi SIKD dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang.⁵⁸

Adapun bentuk laporan pertanggungjawaban sekaligus evaluasi rencana kerja tahun 2021 dijabarkan berdasarkan realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang pada dinas peternakan dan perkebunan Kabupaten Pinrang.

⁵⁸ Hajrah, SP., Kasubang Keuangan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

Tabel 4.3
Laporan dan Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program	Indikator Kinerja Program (autcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja Dan Anggaran Renja SKPD Yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja Dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021)
						I	II	III	IV		
3.2 7	BIDANG URUSAN PEMERINTAH TAHAN BIDANG PERTANIAN		Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)	Rp(000)
3.2 7.0 1	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	Persentase ketercapaian Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.690.753.496	964.129	1.062.952	142.849.199	00.0	299.983.679	00.0	442.832.818	442.834.818
02.	Program Peningkatan sarana dan Prasaran Aparatur	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	1.143.965	1.089.490	1.201.163	11.254.870	20.264.518	40.119.778	123.100.882	194.812.048	195.901.538

06.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian dan keuangan	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik	197.694	188.280	207.579	34.491.000	50.897.000	54.397.000	115.102.000	254.887.000	255.075.280
07.	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Cukupan informasi pembangunan yang disebarluaskan kepada publik	94.038	65.750	98.739	5.255.000	14.671.000	14.671.000	146.710.000	49.268.000	49.333.700
08.	Program peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya yang mempunyai nilai skp baik	275.000	0.00	288.750	57.479.700	107.398.700	107.387.000	107.398.700	379.675.800	397.675.800
02.01	URUSAN PERTANIAN										
02.20	pencegahan dan penanggulan gan penyakit ternak	Persentase menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) 4 % pertahun	1.256.511	1.048.807	1.407.292	37.677.650	553.617.150	766.860.900	1.026.964.050	2.385.120.050	2.386.168.857

02.47	Program peningkatan kelembagaan, mutu dan kemitraan usaha hasil perkebunan	Nilai hasil produksi perkebunan	11.341.072	1.110.377	1.502.001	16.243.500	24.263.500	30.058.500	166.629.300	237.194.800	238.305.177
-------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------

C. Bentuk Akuntabilitas Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyebutkan bahwa akuntabilitas dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan, atau tanggungjawab terkait masalah keuangan, inpeksi, dan seberapa jauh suatu pihak bisa menaati peraturan yang sudah disepakati.
2. Akuntabilitas manfaat, atau akuntabilitas ditinjau dari hasil kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah
3. Akuntabilitas procedural, adalah tanggungjawab terkait apakah suatu kebijakan yang diselenggarakan sudah mempertimbangkan aspek moral, hukum, etika, dan aspek politisi tertentu.⁵⁹

Tabel 4.4
Kategori Peringkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interpreta
1	AA	> 90-100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80-90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3	BB	> 70-80	Sangat Baik , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal
4	B	> 60-70	Baik , akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki

⁵⁹ Wahyudi, "Akuntabilitas Instansi Pemerintah", (Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2011), hal. 11

			sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja
5	CC	> 50-60	Cukup (Memadai) , akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar
6	C	> 30-50	Kurang , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja yang perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	> 0-30	Sangat Kurang , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar

Makna dari sasaran strategis keenam yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan target nilai SAKIP 65,59 (B) yang dihitung dalam satuan nilai selama satu tahun yang dihasilkan dari akumulasi nilai kinerja seluruh bidang lingkup dinas peternakan dan perkebunan Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.5
Capaian per Indikator sasaran strategis ketiga tahun 2021

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase	Ket
1	Nilai SAKIP Dinas Peternakan dan Perkebunan	65 (B)	65,59 (B)	100,9	Melampaui target

Beberapa capaian per indikator sasaran strategis ketiga, realisasi atau target kinerja dinas peternakan dan perkebunan tahun 2021 yang ditetapkan dari 1 (satu) indikator dengan capaian nilai 65,59 (B) atau sebesar 100,9 % melampaui target.

Menurut Koppel terdapat lima dimensi dari akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dalam hal ini segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan daerah dapat diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan ataupun dirahasiakan.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan disajikan secara terbuka dan jujur atas kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran. Dengan demikian, asas transparansi menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses informasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah proaktif dalam memberikan kemudahan bagi siapapun untuk mengakses/mendapatkan informasi terkait pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian dan hasil wawancara yang telah dilakukan di kantor dinas peternakan dan perkebunan bersama dengan Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si, menyatakan bahwa:

Laporan keuangan dan pengelolaan keuangan dinas peternakan dan perkebunan dapat dilihat siapa saja yang membutuhkan, transparansi mengenai laporan keuangan juga dilakukan kepada masyarakat yang ingin melihatnya. Anggaran yang dikeluarkan terkadang juga diperlihatkan dan disampaikan kepada masyarakat. Namun kebanyakan dari anggaran untuk masyarakat tidak langsung berbentuk uang, melainkan berbentuk barang atau pembangunan.⁶⁰

⁶⁰ Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

2. Kewajiban

Konsep yang memasukkan kesalahan kedalam transparansi. Artinya seorang individu atau organisasi harus liabel untuk tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan dan siap mendapatkan penghargaan apabila berhasil. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi menghadapi konsekuensi terkait kinerjanya.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang dalam beberapa *review* hasil kegiatan yang telah dilaksanakan melampirkan beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu :

- a. Keterbatasan SDM pelaksana (petani dan petugas), yang mejadi masalahnya adalah formulasi petugas dinas peternakan dan perkebunan jauh dari kebutuhan sehingga kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan dan peternakan
- b. Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada menyebabkan pembinaan dan pendampingan kelompok tani belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target
- c. Pengendalian penyakit hewan zonasi belum optimal, menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyakit, serta rendahnya pengetahuan tentang pengendalian penyakit.

3. Pengawasan

Merupakan konsep yang dominan dalam akuntabilitas. Konsep ini merupakan titik awal dalam melalukan analisa terhadap akuntabilitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pengamatan peneliti, pelaksanaan pengelolaan keuangan pada dinas peternakan dan perkebunan telah dilaksanakan sesuai kewajibannya dan sebagaimana mestinya, Dimulai dari penyusunan RPJM yang memuat rencana strategis selama 5 tahun, kemudian perencanaan dan penyusunan dan penetapan rencana kerja OPD yang merupakan penjabaran RPJM untuk pembangunan 1 tahun, serta pelaksanaan dari RPJM, Renstra dan Renja yang dilaporkan setiap tahunnya. Serta terakhir penyampaian laporan pertanggungjawaban berdasarkan anggaran dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dan di awasi langsung oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) dan Badan keuangan Daerah (BKUD).

4. Tanggungjawab

Konsep ini yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hukum, aturan dan norma. Tanggungjawab dapat mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berperilaku. Melalui standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada.

Hasil penelitian yang dilakukan pada kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dilandaskan dan terikat dengan hukum atau peraturan-peraturan yang ada atau yang telah di tentukan dimulai dari Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Megara Republik Indonesia Nomor 1822) sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 70 Tahun 2020 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perkebunan.

5. Responsivitas

Konsep mengenai perhatian organisasi terhadap ekspresi langsung atau kebutuhan dan keinginan dari konstitusi organisasi berdasarkan perintah dari pejabat yang dipilih. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah organisasi telah memenuhi harapan (pemerintah, keinginan) secara substansial.

Tugas dan fungsi dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang yaitu pengembangan produksi dan agribisnis peternakan dan perkebunan, perumusan dan penetapan pedoman penanggulangan dan pengendalian penyakit ternak dan hama pengganggu, serta pengembangan teknologi sarana dan prasarana yang mendukung di bidang peternakan dan perkebunan. Berdasarkan hasil kinerja pada laporan pertanggungjawaban yang telah di keluarkan dinas peternakan dan perkebunan beberapa tugas dan fungsi dinas sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati yang dibuktikan dengan beberapa pencapaian hasil kinerja yang meningkat setiap tahunnya.

D. Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan Syariah

1. Larangan riba

Riba dalam istilah berarti kelebihan dan tafsiran sebagai peningkatan modal yang tidak bisa dibenarkan dari sistem keuangan syariah. Riba secara etimologi berasal dari kata “*ar-riba*”, bermakna *zada wa nama*’, yang berarti bertambah dan tumbuh. Sedangkan secara terminologis, riba secara umum diartikan sebagai

melebihkan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut.

Praktek Riba sangat dilarang keras dan diharamkan dalam Islam karena riba sendiri sangat merugikan bagi salah satu pihak dan tidak saling menguntungkan dan riba juga tidak memiliki konsep etika dan moralitas. Allah SWT. Mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, disebabkan dapat menzalimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan.

Banyak Ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang larangan riba serta mengharamkannya, salah satunya dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفُومُونَ إِلَّا كَمَا يُفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapatlah), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka bagi apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁶¹ (QS. Al-Baqarah : 275).

Sesungguhnya Allah SWT. Sangat mengharamkan riba dan orang-orang yang memakan riba sama dengan orang yang kemasukan syaitan. Sesungguhnya Allah

⁶¹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, h. 69

SWT. juga telah menghalalkan jual beli dan mengaramkan riba karena perbuatan riba merupakan perbuatan yang keji dan menzalimi.

Riba dalam prakteknya yang berdasarkan dengan konsep syariah, riba merupakan sesuatu yang diharamkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan, semua sistem dan praktek kegiatan yang dilaksanakan tidak berpedoman dengan konsep syariah dikarenakan Dinas Peternakan dan perkebunan merupakan Instansi naungan pemerintahan dan Negara Republik Indonesia bukan Negara Islam, namun tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini juga di sampaikan oleh Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si dari wawancara yang telah dilakukan, yang menyatakan bahwa :

Dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang merupakan suatu instansi yang dinaungi oleh pemerintah oleh karena itu semua sistem dan tatacara pengelolaan kegiatan dan keuangan berdasar kepada peraturan pemerintah atau peraturan menteri dan sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, namun dalam hal ini kita juga tetap memperhatikan beberapa prinsip yang sebenarnya menjadi larangan dalam islam, hal ini juga guna untuk mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama.⁶²

2. Uang sebagai modal potensial

Ekonomi islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdu-nuqdu* yaitu *al-naqdu* berarti yang baik dari dirham, dan *al-nuqdu* berarti tunai.⁶³

Uang dalam Islam, tidak diperbolehkan apabila dianggap sebagai komoditas yaitu uang dipandang memiliki kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk memperoleh keuntungan. Sistem keuangan Islam memandang uang boleh dianggap sebagai modal yaitu uang bersifat produktif, dapat

⁶² Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

⁶³ Ahmad Hasan, "*Mata Uang Islam*", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal.2

menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk memperoleh keuntungan.

Allah STW. berfirman dalam QS. Ali Imran ayat 17 yang berbunyi :

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Terjemahnya :

*Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga) (QS. Ali Imran : 14).*⁶⁴

Menurut Prof. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam pandangan Al-Qur'an, uang merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting dibawah manusia dan sumber daya alam. Hal ini berbeda dengan pelaku ekonomi modern yang memandang uang sebagai segala sesuatu sehingga manusia atau sumber daya alam ditelantarkan (dianiaya).⁶⁵

Hasil penelitian yang dilakukan di kantor dinas peternakan dan perkebunan dalam prakteknya tidak menganggap uang sebagai modal potensial yang utama melainkan menganggap uang sebagai modal yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat pertanian yang membutuhkan. Salah satu anggaran yang dikeluarkan oleh dinas peternakan dan perkebunan adalah dana hibah, dimana dalam penerapannya berbentuk barang atau infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat.

⁶⁴ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

⁶⁵ Wasan Al-Qur'an, Hal. 352

3. Larangan perilaku spekulatif

Spekulasi yang dilarang dalam agama adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (Gambling). Spekulasi terjadi karena adanya ketidakjelasan (jahalah) mengenai apa yang akan terjadi di kemudian waktu yang berdampak negatif dalam aktivitas bisnis.

Tindakan spekulasi berangkat dari keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar dengan tidak memperdulikan tanggungjawab dan dampak negatif yang merugikan. Spekulasi dilarang oleh agama karena dapat merugikan diri sendiri dan berakibat munculnya permusuhan antar manusia.

Allah SWT. melarang keras perbuatan spekulatif yang salah satunya di tuangkan dalam QS. Al- Maidah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman; sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS. Al-Mai'idah: 90).⁶⁶

Hasil penelitian yang dilakukan di kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang, dapat disimpulkan bahwa semua kegiatan yang dilakukan mulai dari penganggaran, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan laporan keuangan dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan dan mengikat kepada peraturan-peraturan pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun peraturan pemerintah daerah dan sistematika penyusunan rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban juga di ikat

⁶⁶ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

dengan peraturan-peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi, dalam hal ini tindakan spekulatif tidak di temukan dalam kegiatannya.

4. Keadilan sosial

Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan sosial di artikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran.⁶⁷ Keadilan biasa dimaknakan dengan memberikan hak kepada yang berhak, atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Keadilan dalam ajaran islam tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Hadid yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadila) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (Agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid: 25).*⁶⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah SWT, termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial.

⁶⁷ Depdiknas, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

⁶⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Mubyarto membedakan keadilan sosial dengan keadilan ekonomi. Keadilan sosial sangat berkaitan dengan keadilan distribusi atau pembagian hasil yang adil daripada produksi atau pendapatan nasional. Sedangkan keadilan ekonomi adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap orang untuk melakukan produksi.⁶⁹ Konsep keadilan sosial ekonomi dalam perspektif islam berasaskan ajaran persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis seperti yang dinyatakan dalam al-Qur'an. Hal ini juga menjelaskan bahwa dalam konsep Islam derajat semua manusia sama dihadapan Allah SWT.

Konsep keadilan sosial dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang, diterapkan di salah satu program kerja yang dijalankan yaitu pemberian bantuan atau dana hibah kepada masyarakat tani atau peternak yang membutuhkan. Hal ini juga didasarkan kepada tujuan dinas peternakan dan perkebunan yaitu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi peternakan dan perkebunan dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan sekaligus untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani dan peternak.

Dana hibah yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara merata disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan petani. Pada wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syamsul Alam S.Pd., M.Si menyatakan bahwa :

Tujuan utama Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang adalah memberikan pengawasan, bantuan dan edukasi kepada masyarakat mengenai perkebunan dan peternakan, hal ini untuk meningkatkan kesuksesan dan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam sektor peternakan dan perkebunan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuknya program rencana kerja serta anggaran untuk itu. Pemberian dana hibah atau bantuan dilakukan berupa

⁶⁹ Mubyarto, "*Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*", (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 23

barang atau pembangunan infrastruktur yang merata agar setiap masyarakat tani dapat merasakannya.⁷⁰

Pernyataan di atas dapat penulis simpulkan bahwa dinas peternakan dan perkebunan di setiap program kerjanya mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pemahaman dalam bidang peternakan dan pertanian.



⁷⁰ Syamsul Alam S.Pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan, Wawancara di kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tanggal 28 September 2022

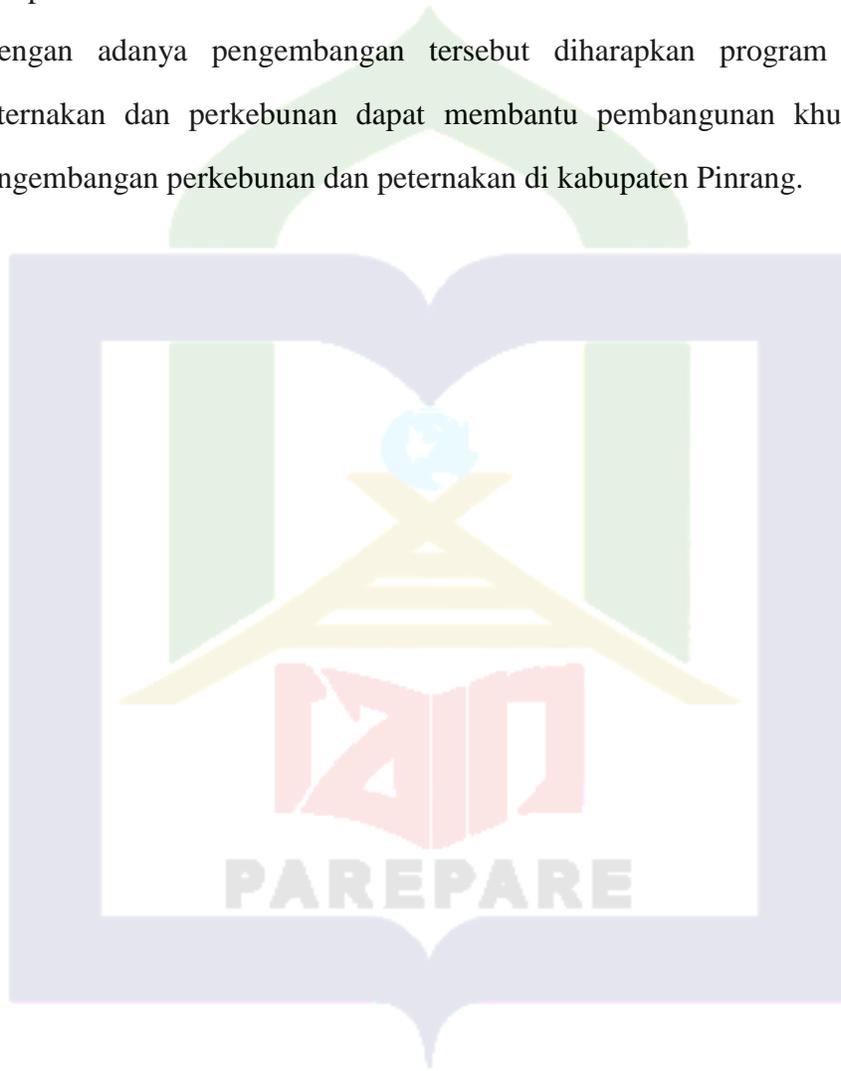
BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Sistem dan mekanisme penganggaran pada kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017. yang dimulai dengan penyusunan Rencana strategis (RENSTRA) dalam jangka waktu 5 tahun, dilanjut dengan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) dalam periode 1 (satu) tahun. Hasil pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan dan disampaikan ke Bupati Pinrang melalui Badan keuangan Daerah (BKUD).
2. Realisasi anggaran dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang dilakukan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya populasi hewan ternak dan menurunnya penyakit menular pada hewan ternak dengan rata-rata persentase 100,9 %, serta beberapa pembangunan yang ada di masyarakat.
3. Pengelolaan keuangan pada kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pada prinsip manajemen keuangan syariah kantor dinas peternakan dan perkebunan kabupaten pinrang tidak menggunakan prinsip syariah, hal ini dikarenakan dinas peternakan dan perkebunan kabupaten Pinrang merupakan instansi pemerintah yang seluruh kegiatan yang dilakukan di dasarkan kepada peraturan-peraturan pemerintah. Namun dalam praktiknya kegiatan-kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan tetap memperhatikan kaidah-kaidah islam dan tetap memperhatikan kesejahteraan dan keadilan umat.

B. SARAN

1. Kantor dinas peternakan dan perkebunan harus mampu mempertahankan dan mengembangkan program kerja dan karyawannya agar segala target dan tujuan tercapai maksimal.
2. Dengan adanya pengembangan tersebut diharapkan program kerja dinas peternakan dan perkebunan dapat membantu pembangunan khususnya pada pengembangan perkebunan dan peternakan di kabupaten Pinrang.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

BUKU

Akhmad, "*Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*", Yogyakarta: Pustaka AQ, 2019.

Arifin, Zainal, "*Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*", Bandung: Alfabeta, 2010.

Arikunto, Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Jakarta: PT Rineka Salemba Empat, 2004

Basrowi dan Suwandi. 2009. "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Jakarta: PT RINEKA CIPTA.

Brigham, Eugene F., Houston, Joel F. 2001. "*Manajemen Keuangan, Edisi Kedepalarn*", Jakarta: Erlangga.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, "*Manajemen Syariah dalam Praktiki*".

Fahmi, "*Pengantar Manajemen Keuangan*", (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 2

Hafidhuddin, Didin dan Tanjung Hendri. 2003. "*Manajemen Syariah dalam Praktik*", Jakarta: Gema Insani Press.

Harmono, "*Manajemen Keuangan*", Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.

Hasibuan, Mwlayu S.P, "*Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*" Cet VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Husen, Dadang, "*Manajemen Keuangan Syariah*", Bandung: Pustaka Setia, 2017.

Kartiwa, H. Asep, "*Metode Penelitian Administrasi*", Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Kasmir, "*Pengantar Manajemen Keuangan*", Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.

- Kopel, Jonathan GS, *“Pathologies of Accountability, ICANN and the Challenge of Multiple Accountabilities”*, Disordes Public Administration, 2005.
- Mardiasmo, *“Akuntansi Sektor Publik”*, Jakarta: Binus University, 2016.
- Mardiasmo, *“Akuntansi Sektor Publik”*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Muhamad, *“Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan”*, Cet-II; Yogyakarta: UPP ATIM YKPN, 2018
- Najib, Mohammad, *“Manajemen Keuangan”*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Nurzaman, Kadar, *Manajemen Perusahaan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Presiden Republik Indonesia, *“Peraturan Menteri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010”* Lampiran II.01 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah
- Raco, Josef, *“Metode Penelitian Bisnis”*, Yogyakarta: Andi Offset, 2017.
- Rudianto, *“Penganggaran”*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Rusdiana, *“Manajemen Konflik”*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Ruslan, Rosandy, *“Metode Penelitian Public Relayions dan Komunikasi”*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Silalahi, *“Studi Tentang Ilmu Administrasi”*, Cetakan Kelima; Bandung: Sinar Baru Aglesindo, 2003.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sugiyono, *“Memahami Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D”*, Bandung: Aflbeta, 2007.
- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi”*, Mixed Methods.
- Sukirni, Sadono, *“Pengantar Bisnis”*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sutrisno, *“Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi”*, Yogyakarta: Ekomisia, 2012.
- Thesaurianto, Kuncoro, *“Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”*, Thesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Usman, Musaini Dan Akbar, Purnomo Setiady. 2016. *“Metode penelitian Sosial”*, Jakarta: Bumi Aksara.

Wahyudi, *“Akuntabilitas Instansi Pemerintah”*, Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, 2011.

Yusanto, Muhammad Ismail dkk. 2002. *“Pengantar Manajemen Syariah”*, Jakarta: Khairul Bayan.

Yuwono, Sony, dkk, 2005. *“Penggangan sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)”*, Malang: Buyamedia Publishing.

SKRIPSI

Dzulfikar, M. Abid, *“Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah Di SMA Negeri se-Kabupaten Kendal”*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015.

Fadli Nurul, *“Analisis Pengelolaan Keuangan Sekolah (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bandar Kabupaten Bener Meriah)”*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018.

Mu'minah, Himmah, *“Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang”*, Skripsi: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2019.

Pradana, Herybertus Yudha, *“Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desan Jatimulyo Kecamatan Girimulyo Kabupaten Kulon Progo)”*. Skripsi: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018.

Riyanti, Umi, *“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Pelalawan.”*, Skripsi: Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Sampurna, Indah, *“Akuntabilitas Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Perspektif Good Governence”*, Skripsi: Universitas Brawijaya, Malang, 2018.

INTERNET

Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-26-27.html>



Surat Permohonan Izin Penelitian ke Bupati Pinrang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4211/ln.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LISNADILA
Tempat/ Tgl. Lahir : KAJUANGIN 15 OKTOBER 2000
NIM : 18.2900.052
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : DESA SABBANG PARU, KECAMATAN LEMBANG,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR DINAS
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN
PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAT**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

05 September 2022
Dekan,

Muztalifah Muhammaduny

Surat Permohonan Izin Penelitian ke Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.4697/In.39.8/PP.00.9/09/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. KEPALA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG

Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : LISNADILA
Tempat/ Tgl. Lahir : KAJUANGIN, 15 OKTOBER 2000
NIM : 18.2900.052
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH
Semester : IX (SEMBILAN)
Alamat : KAJUANGIN, KELURAHAN SABBANG PARU,
KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAT

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 27 September 2022

Dekan,



Muztalifah Muhammadun

Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0478/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 14-09-2022 atas nama LISNADILA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1203/R/T.Teknis/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 15-09-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0487/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/09/2022, Tanggal : 16-09-2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO.8 SOREANG
3. Nama Peneliti	: LISNADILA
4. Judul Penelitian	: AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN KAUANGAN SYARIAH
5. Jangka waktu Penelitian	: 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: BAGIAN KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KAB. PINRANG
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Bulu

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-03-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Biaya : Rp 0,-

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 20 September 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDL MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DPMPTSP

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
Jln. Poros Pinrang Pare – Pare Km.6 Telp/Fax (0421) 923067

SURAT KETERANGAN PENELITIAN / STUDI
NO. 800.2 / 1520 / DISNAKBUN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang menerangkan bahwa :

Nama : LISNADILA
Nim : 18.2900.052
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN PAREPARE

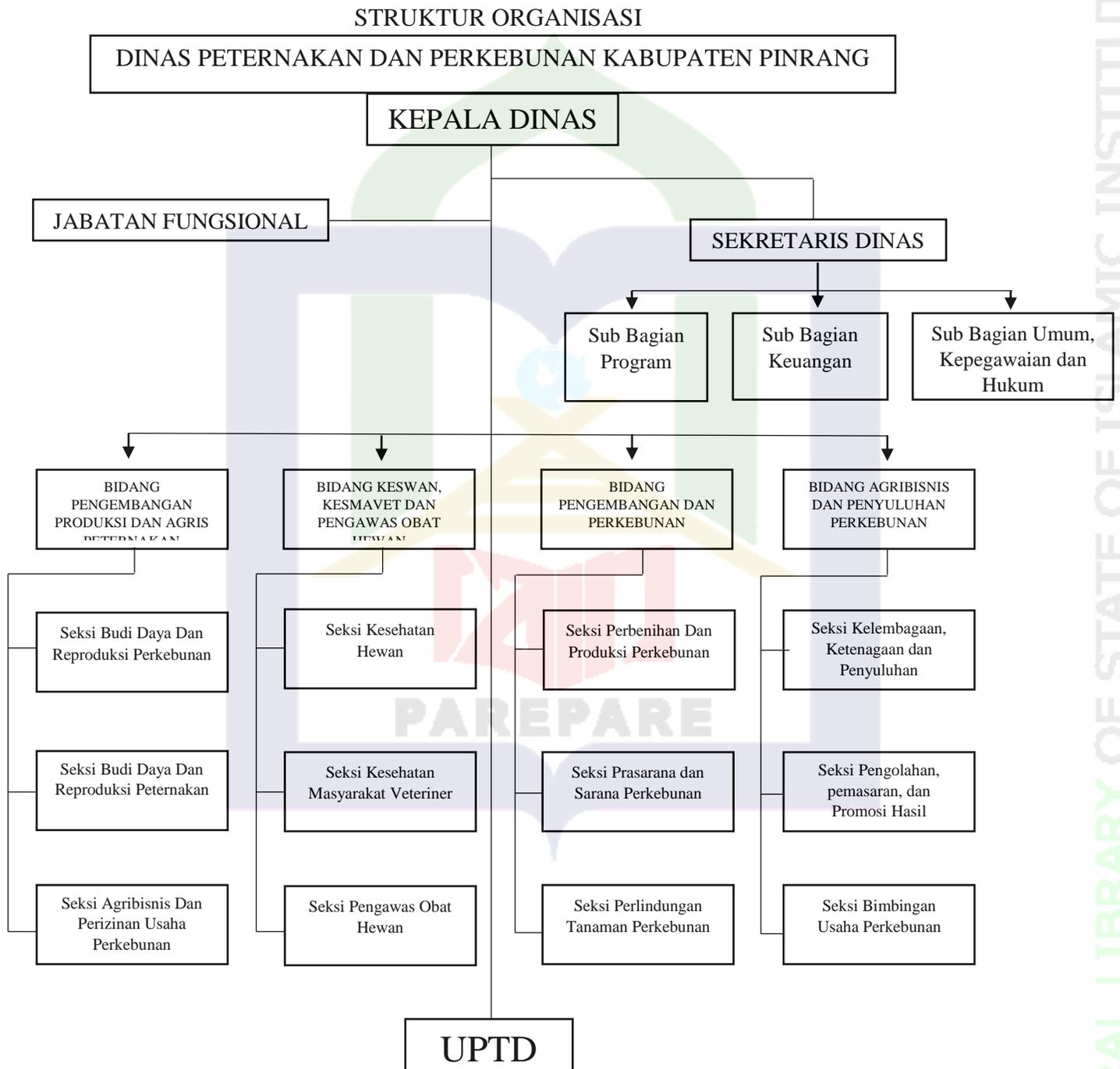
Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang selama 40 hari tahun 2022 dengan Judul Penelitian **"AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH"**
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Pinrang 15 November 2022

An. Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan


Ir. HARTATI KARIM, MP
Pangkat : Pembina Tk.I
No. 19670208 199303 2 002

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang



Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang terdiri dari:

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub bagian program
 2. Sub bagian umum, kepegawaian dan hukum; dan
 3. Sub bagian keuangan
- c. Bidang pengembangan produksi dan agribisnis peternakan terdiri atas:
 1. Seksi budidaya dan reproduksi
 2. Seksi pakan, prasarana dan sarana peternakan; dan
 3. Seksi agribisnis dan perizinan usaha peternakan
- d. Bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan terdiri atas:
 1. Seksi kesehatan hewan
 2. Seksi kesehatan masyarakat veteriner, dan
 3. Seksi pengawas obat hewan
- e. Bidang pengembangan perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi perbenihan dan produksi perkebunan
 2. Seksi prasarana dan sarana perkebunan; dan
 3. Seksi perlindungan tanaman perkebunan
- f. Bidang agribisnis dan penyuluhan perkebunan terdiri atas:
 1. Seksi kelembagaan, ketenagaan dan penyuluhan perkebunan
 2. Seksi pengolahan, pemasaran dan promosi hasil perkebunan; dan
 3. Seksi bimbingan usaha perkebunan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 1. UPTD instalasi perbibitan ternak
 2. UPTD puskesmas
- h. Jabatan fungsiona

**Aplikasi SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) Dinas
Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang tahun 2020**



Laporan Neraca Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG NERACA BULAN DESEMBER TAHUN 2021 Dinas Peternakan dan Perkebunan						
KODE	URAIAN	2021	2020	%	SELISIH	
1.1	ASET LANCAR	240.000,00	1.139.800,00	-78,94	-899.800,00	
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00		0,00	
1.1.01.02	Kas di Bendahara Pemertama	0,00	0,00		0,00	
1.1.01.02.01	Kas di Bendahara Pemertama	0,00	0,00		0,00	
1.1.01.02.01.0001	Kas di Bendahara Pemertama	0,00	0,00		0,00	
1.1.01.03	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00		0,00	
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00		0,00	
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00		0,00	
1.1.12	Perediaan	240.000,00	1.139.800,00	-78,94	-899.800,00	
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	240.000,00	1.139.800,00	-78,94	-899.800,00	
1.1.12.01.03	Alat Bantu Untuk Kegiatan Kantor	240.000,00	1.139.800,00	-78,94	-899.800,00	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	240.000,00	1.135.000,00	-78,85	-895.000,00	
1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	0,00	4.800,00	>999	-4.800,00	
1.3	ASET TETAP	8.316.619.698,31	8.586.773.041,49	-3,15	-270.153.343,18	
1.3.01	Tanah	1.560.480.000,00	1.560.480.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01	Tanah	1.560.480.000,00	1.560.480.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01.01	Tanah Peroleh	1.090.150.000,00	1.090.150.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung-Pedagangan Perumahan	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.086.480.000,00	1.086.480.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01.02	Tanah Non Peroleh	470.330.000,00	470.330.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01.02.0002	Tanah Korang	462.250.000,00	462.250.000,00	0,00	0,00	
1.3.01.01.02.0003	Tanah Perkebunan	8.080.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00	
1.3.02	Peralatan dan Meubel	3.059.342.150,00	2.985.222.150,00	2,48	74.110.000,00	
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.173.077.650,00	1.173.077.650,00	-0,38	-4.500,00	
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.173.077.650,00	1.173.077.650,00	0,00	0,00	
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Persewaan	449.500.000,00	449.500.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	585.815.900,00	585.815.900,00	0,00	0,00	
1.3.02.02.01.0005	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	137.761.750,00	137.761.750,00	0,00	0,00	
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0,00	4.500.000,00	>999	-4.500.000,00	
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	4.500.000,00	>999	-4.500.000,00	
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	112.900.000,00	112.900.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.03.03	Alat Ukur	112.900.000,00	112.900.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	86.500.000,00	86.500.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan Baku	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.03.03.0011	Anak Timbangan Baku	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04	Alat Pertanian	246.297.000,00	246.297.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	246.297.000,00	246.297.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01.0003	Alat Papan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyempitan Hasil Perkebunan Pertanian	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01.0005	Alat Laboratorium Pertanian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01.0006	Alat Persewaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01.0007	Alat Papan Papan	55.897.000,00	55.897.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.04.01.0009	Alat Alat Persewaan	97.900.000,00	97.900.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	583.043.800,00	525.233.800,00	7,20	57.810.000,00	
1.3.02.05.01	Alat Kantor	145.000.000,00	144.200.000,00	0,55	800.000,00	
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	0,00	2.700.000,00	>999	-2.700.000,00	
1.3.02.05.01.0004	Alat Persewaan Persewaan Kantor	124.000.000,00	124.000.000,00	0,00	0,00	
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00	17.500.000,00	20,00	3.500.000,00	
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	367.343.800,00	352.633.800,00	4,17	14.710.000,00	
1.3.02.05.02.0001	Mebel	135.454.000,00	137.364.000,00	-14,00	-22.050.000,00	
1.3.02.05.02.0004	Alat Pemanggang	144.689.800,00	101.929.800,00	41,93	42.760.000,00	
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (House Use)	87.200.000,00	93.300.000,00	-6,44	-6.000.000,00	
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja Ruang Pejabat	50.700.000,00	28.400.000,00	78,57	22.300.000,00	
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	9.200.000,00	0,00		9.200.000,00	

Direksi Pengelolaan SKD Versi 7.1.21 Tanggal

Halaman 1 dari 2



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
NERACA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021
Dasar Penetapan dan Perkebonan

KODE	URAIAN	2021	2020	%	SILSBI
1.3.02.01.01.0001	Kios Koin Pezabir	3.000.000,00	28.400.000,00	12,68	3.000.000,00
1.3.02.01.01.0006	Kios Tenda di Komplek Pezabir	3.500.000,00	0,00		3.500.000,00
1.3.02.01.01.0007	Lantai dan Atap Pezabir	6.000.000,00	0,00		6.000.000,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasukan	161.455.000,00	152.655.000,00	5,76	8.800.000,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	109.300.000,00	98.000.000,00	11,53	11.300.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	98.000.000,00	98.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	0,00	0,00		0,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	11.300.000,00	0,00		11.300.000,00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	33.855.000,00	38.455.000,00	-6,50	-2.500.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telepon	33.855.000,00	33.855.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Sosial	0,00	2.500.000,00	-999	-2.500.000,00
1.3.02.06.03	Peralatan Perekaman	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02.06.03.0024	Peralatan Aerasi Penerimaan XHD	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07	Alat Kebersihan dan Kesehatan	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07.01	Alat Kebersihan	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
1.3.02.07.01.0029	Alat Kebersihan Lainnya	46.500.000,00	46.500.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	75.168.700,00	75.168.700,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	75.168.700,00	75.168.700,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Pertanian	47.768.700,00	47.768.700,00	0,00	0,00
1.3.02.10	Konsep	650.000.000,00	645.900.000,00	4,83	32.000.000,00
1.3.02.10.01	Konsep Uji	540.000.000,00	531.400.000,00	1,79	9.500.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	496.900.000,00	531.400.000,00	-6,49	-34.500.000,00
1.3.02.10.01.0003	Konsep Uji Lainnya	44.000.000,00	0,00		44.000.000,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	140.000.000,00	117.500.000,00	18,15	22.500.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Alan Computer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	135.000.000,00	112.500.000,00	20,00	22.500.000,00
1.3.02.18	Alat Peraga	0,00	0,00		0,00
1.3.02.18.01	Alat Peraga Perilaku dan Persewaan	0,00	0,00		0,00
1.3.02.18.01.0003	Alat Peraga Perilaku dan Persewaan Lainnya	0,00	0,00		0,00
1.3.01	Gedung dan Bangunan	6.533.728.170,12	6.553.528.170,12	-0,30	-19.800.000,00
1.3.01.01	Bangunan Gedung	6.533.728.170,12	6.553.528.170,12	-0,30	-19.800.000,00
1.3.01.01.01	Bangunan Gedung Tempel Kota	6.012.427.283,11	6.115.227.283,11	-0,32	-18.800.000,00
1.3.01.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	3.432.094.452,10	3.431.854.452,10	-0,57	-19.800.000,00
1.3.01.01.01.0002	Bangunan Gedung	2.089.925.878,37	2.089.925.878,37	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0004	Bangunan Gedung Jamban	75.822.181,59	75.822.181,59	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempel Perumahan	152.421.638,18	152.421.638,18	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Perijinan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01.0029	Bangunan Perumahan Perkotaan	1.874.096.433,57	1.874.096.433,57	0,00	0,00
1.3.01.01.02	Bangunan Gedung Tempel Yanggali	421.301.887,01	421.301.887,01	0,00	0,00
1.3.01.01.02.0002	Rumah Negara Gedung II	125.400.000,00	127.400.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.02.0003	Rumah Negara Gedung III	141.238.848,01	141.238.848,01	0,00	0,00
1.3.01.01.02.0013	Bangunan Gedung Tempel Yanggali Lainnya	154.663.039,00	152.663.039,00	0,00	0,00
1.3.04	Jalan, Jembatan, dan Tugu	76.233.886,30	802.233.886,30	0,00	0,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	336.734.000,00	336.734.000,00	0,00	0,00
1.3.04.01.01	Jalan	336.036.000,00	336.036.000,00	0,00	0,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	336.036.000,00	336.036.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02	Bangunan Air	397.650.768,30	397.650.768,30	0,00	0,00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai Pantai dan Pengaliran Benda Alam	237.150.768,30	237.150.768,30	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Perintang Pengaman Sungai	66.070.768,30	66.070.768,30	0,00	0,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengaliran Sungai Pantai	171.080.000,00	171.080.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air-Tanah	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.05.0001	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	0,00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih Air Baku	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00

Direkt: Himpunan MKD Versi 2.1.21 Tanggal

Halaman 3 dari 3



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
NERACA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021
Dinas Peternakan dan Perkebunan

KODE	URAIAN	2021	2020	%	SELISIH
1.3.04.02.06.0006	Bangunan Air Bersih Air Baku Lainnya	98.000.000,00	91.000.000,00	0,00	0,00
1.3.04.03	Instalasi	30.547.127,00	30.547.127,00	0,00	0,00
1.3.04.03.03	Instalasi Pengolahan Sampah	30.547.127,00	30.547.127,00	0,00	0,00
1.3.04.03.03.0001	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	30.547.127,00	30.547.127,00	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	505.489.443,56	505.489.443,56	0,00	0,00
1.3.05.03	Hewan	291.252.443,56	291.252.443,56	0,00	0,00
1.3.05.03.02	Ternak	291.252.443,56	291.252.443,56	0,00	0,00
1.3.05.03.02.0001	Ternak Perong	291.252.443,56	291.252.443,56	0,00	0,00
1.3.05.07	Aset Tetap Dalam Renovasi	214.237.000,00	214.237.000,00	0,00	0,00
1.3.05.07.01	Aset Tetap Dalam Renovasi	214.237.000,00	214.237.000,00	0,00	0,00
1.3.05.07.01.0001	Aset Tetap Dalam Renovasi	214.237.000,00	214.237.000,00	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	-4.109.655.050,67	-3.785.191,617,49	8,57	-324.463.433,18
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-2.559.872.179,76	-2.392.498,036,90	7,00	-167.374.142,86
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-1.022.135,054,77	-983.270,911,91	3,95	-38.864.142,86
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bemoor-Kendaraan Darat Bemoor Persewaan	-449.500.000,00	-449.500.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bemoor-Kendaraan Bemoor Beroda Dua	-414.873,704,77	-392.434,161,91	10,76	-42.239.142,86
1.3.07.01.02.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bemoor-Kendaraan Bemoor Beroda Tiga	-137.761,750,00	-137.761,750,00	0,00	0,00
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bemoor-Kendaraan Tak Bemoor Angkutan Barang	0,00	-3.375.000,00	-999	3.375.000,00
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bepergi dan Alat Ukur	-102.483.333,33	-89.983.333,33	13,89	-12.500.000,00
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	-76.083.333,33	-63.583.333,33	19,66	-12.500.000,00
1.3.07.01.03.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan Bicara	-22.000.000,00	-22.000.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.03.0034	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan Bicara	-4.400.000,00	-4.400.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.04	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-235.692.833,33	-225.442.833,33	4,55	-10.250.000,00
1.3.07.01.04.0903	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Papan	-6.645.833,33	-3.895.833,33	70,59	-2.750.000,00
1.3.07.01.04.0904	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Penyimpanan Hasil Perolehan Pertanian	-26.000.000,00	-26.000.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.04.0905	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.04.0906	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Processing	-45.500.000,00	-45.500.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.04.0907	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Papan Papan	-55.897.000,00	-55.897.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.04.0909	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	-91.650.000,00	-84.150.000,00	8,91	-7.500.000,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-213.035.799,99	-371.745.466,66	13,80	-51.290.333,33
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Kecil	0,00	-2.565.000,00	-999	2.565.000,00
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyusutan Perengkapan Kantor	-105.500.000,00	-95.500.000,00	10,01	-9.600.000,00
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-13.250.000,00	-10.250.000,00	29,27	-3.000.000,00
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-134.087.333,33	-122.587.333,33	9,38	-11.500.000,00
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Peralatan	-74.545.133,33	-62.778.133,33	18,74	-11.767.000,00
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-71.888.333,33	-61.348.333,33	17,18	-10.540.000,00
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-803.333,33	0,00		-803.333,33
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-21.736.666,67	-16.316.666,67	33,22	-5.420.000,00
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja Rapat Pejabat-Kursi Tahan di Ruang Pejabat	-525.000,00	0,00		-525.000,00
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja Rapat Pejabat-Lainnya dan Krap Pejabat	700.000,00	0,00		-700.000,00
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasaran	-134.615.000,01	-122.804.916,67	9,62	-11.810.083,34
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan-Studio Video dan Film	-82.083.333,34	-68.416.666,67	19,98	-13.666.666,67
1.3.07.01.06.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-376.666,67	0,00		-376.666,67
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-35.555.000,00	-33.688.250,00	6,75	-266.750,00
1.3.07.01.06.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	0,00	-2.500.000,00	-999	2.500.000,00
1.3.07.01.06.0041	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemasaran-Peralatan Antena Penerima TVIF	-16.200.000,00	-16.200.000,00	0,00	0,00
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan dan Kesehatan	-19.375.000,00	-10.075.000,00	92,31	-9.300.000,00

Dititik Menghasilkan SR-D Versi 2.1.21 Tanggal

Halaman 3 Dari 3



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
NERACA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021
Dinas Peternakan dan Perkebunan

KODE	URAIAN	2021	2020	%	SELISIH
1.3.07.01.07.0029	Akumulasi Penyusutan Alat Kebakaran-Alat-Kedokteran Lainnya	-19,375,000.00	-10,075,000.00	92.31	-9,300,000.00
1.3.07.01.08	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-59,885,158.33	-53,640,158.33	11.64	-6,245,000.00
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	-20,379,583.33	-16,947,083.33	20.25	-3,432,500.00
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	-39,505,575.00	-36,693,075.00	7.66	-2,812,500.00
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	-562,650,000.00	-535,535,416.67	5.06	-27,114,583.33
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-447,066,666.67	-439,400,000.00	1.74	-7,666,666.67
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-6,145,833.33	0.00		-6,145,833.33
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-104,487,500.00	-91,135,416.67	14.60	-13,302,083.33
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-1,048,066,748.76	-916,805,587.98	14.32	-131,261,160.78
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-1,048,066,748.76	-916,805,587.98	14.32	-131,261,160.78
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer-Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-630,699,029.50	-561,557,196.46	12.31	-69,141,833.04
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer-Kerja-Bangunan Gedung Intakalai	-7,961,329.10	-6,444,885.46	23.53	-1,516,443.64
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer-Kerja-Bangunan Gedung Temporer Pertemuan	-26,322,429.40	-22,649,506.84	16.22	-3,672,922.56
1.3.07.02.01.0013	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer-Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	-8,000,000.00	-7,200,000.00	11.11	-800,000.00
1.3.07.02.01.0029	Akumulasi Penyusutan Gedung Temporer-Kerja-Bangunan Pertemuan-Pertemuan	-227,867,209.80	-194,313,448.90	17.27	-33,553,760.90
1.3.07.02.01.0039	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Temporer-Tinggal-Berhulu Negara Golongan II	-33,124,000.00	-30,576,000.00	8.33	-2,548,000.00
1.3.07.02.01.0040	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Temporer-Tinggal-Berhulu Negara Golongan III	-22,257,365.00	-19,527,386.04	13.98	-2,729,978.96
1.3.07.02.01.0050	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Temporer-Tinggal-Bangunan Gedung Temporer-Tinggal Lainnya	-49,337,305.61	-16,284,046.83	18.75	-3,053,258.78
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jembatan, dan Irigasi	-467,270,942.15	-445,727,552.61	4.83	-21,543,389.54
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	-339,036,000.00	-339,036,000.00	0.00	0.00
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	-339,036,000.00	-339,036,000.00	0.00	0.00
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	-106,851,933.25	-88,360,276.41	20.92	-18,488,676.84
1.3.07.03.02.0028	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaturan Sungai-Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembebasan Pengaturan Sungai	-41,844,819.93	-35,237,743.09	18.75	-6,607,076.84
1.3.07.03.02.0029	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaturan Sungai-Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaturan Pengaturan Sungai Pantai	-21,727,966.66	-18,306,366.66	18.69	-3,421,600.00
1.3.07.03.02.0032	Akumulasi Penyusutan Bangunan-Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	-31,770,833.33	-25,520,833.33	24.49	-6,250,000.00
1.3.07.03.02.0045	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih-Air-Baku-Bangunan Air Bersih-Air Baku Lainnya	-11,508,333.33	-9,298,333.33	23.77	-2,210,000.00
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-21,382,988.90	-18,328,276.20	16.67	-3,054,712.70
1.3.07.03.03.0010	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Organik	-21,382,988.90	-18,328,276.20	16.67	-3,054,712.70
1.3.07.04	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-34,445,180.00	-30,160,440.00	14.21	-4,284,740.00
1.3.07.04.02	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-34,445,180.00	-30,160,440.00	14.21	-4,284,740.00
1.3.07.04.02.0001	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	-34,445,180.00	-30,160,440.00	14.21	-4,284,740.00
1.5	ASET LAINNYA	363,923,020.02	318,319,020.02	14.33	45,604,000.00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
1.5.03.01.01.0005	Software	35,500,000.00	35,500,000.00	0.00	0.00
1.5.04	Aset Lain-lain	363,923,020.02	318,319,020.02	14.33	45,604,000.00
1.5.04.01	Aset Lain-lain	363,923,020.02	318,319,020.02	14.33	45,604,000.00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	363,923,020.02	318,319,020.02	14.33	45,604,000.00
1.5.04.01.01.0001	Aset Kasuk Berat Uang	363,923,020.02	318,319,020.02	14.33	45,604,000.00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-35,500,000.00	-35,500,000.00	0.00	0.00
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-35,500,000.00	-35,500,000.00	0.00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
NERACA
BULAN DESEMBER TAHUN 2021
Dinas Peternakan dan Perkebunan

KODE	URAIAN	2021	2020	%	SELISIH
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-35,500,000.00	-35,500,000.00	0.00	0.00
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	-35,500,000.00	-35,500,000.00	0.00	0.00
	TOTAL ASET	8,680,782,628.33	8,906,231,861.51	-2.53	-225,449,233.18
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,841,150.00	11,648,000.00	36.00	4,193,150.00
2.1.06	Utang Belanja	15,841,150.00	11,648,000.00	36.00	4,193,150.00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	15,841,150.00	11,648,000.00	36.00	4,193,150.00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	15,841,150.00	11,648,000.00	36.00	4,193,150.00
2.1.06.02.03.0518	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Bangunan Gedung- Bangunan Gedung-Kantor	15,841,150.00	11,648,000.00	36.00	4,193,150.00
	TOTAL KEWAJIBAN	15,841,150.00	11,648,000.00	36.00	4,193,150.00
3.1	EKUITAS	8,664,941,478.33	8,894,583,861.51	-2.58	-229,642,383.18
3.1.01	Ekuitas	776,812,989.33	8,894,583,861.51	-91.27	-8,117,770,872.18
3.1.01.01	Ekuitas	8,932,583,861.51	8,894,583,861.51	0.43	38,000,000.00
3.1.01.01.01	Ekuitas	38,000,000.00	0.00		38,000,000.00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	38,000,000.00	0.00		38,000,000.00
3.1.01.02	Surplus Defisit-LO	-8,155,770,872.18	0.00		-8,155,770,872.18
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonosolidasikan	7,888,128,489.00	0.00		7,888,128,489.00
3.1.03.01	RK PPKD	7,888,128,489.00	0.00		7,888,128,489.00
3.1.03.01.01	RK PPKD	7,888,128,489.00	0.00		7,888,128,489.00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	7,888,128,489.00	0.00		7,888,128,489.00
	TOTAL EKUITAS	8,664,941,478.33	8,894,583,861.51	-2.58	-229,642,383.18
	TOTAL KEWAJIBAN - EKUITAS	8,680,782,628.33	8,906,231,861.51	-2.53	-225,449,233.18

Pinrang, 25 Februari 2022
Ptl. Kepala Dinas
DINAS PETERNAKAN
DAN PERKEBUNAN
D. H. SUDIRMAN
Nip. 196507241995031002

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : LISNADILA
NIM : 18.2900.052
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN
PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG
BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penganggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
3. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan yang baik ?

5. Apa saja yang biasanya menghambat pelaporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.
6. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan keuangan ?
7. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan?
8. Apakah pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan menggunakan prinsip syariah ?

Parepare, 12 April 2022

Pembimbing Utama

Dr. M. Nasri Hamang, M.Ag
NIP. 19571231 199102 1 004

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping

Dr. Damirah, S.E., M.M
NIP. 19760604 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : LISNADILA
NIM : 18.2900.052
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS ADMINISTRASI KEUANGAN
PADA KANTOR DINAS PETERNAKAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PINRANG
BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 1: Bapak Syamsul Alam. S.pd., M.Si, Bagian Program dan Perencanaan

1. Bagaimana proses penganggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Proses penganggaran pada kantor dinas peternakan dan perkebunan dimulai dengan penentuan Renstra (Rencana Strategis) dalam periode 5 tahun kemudian dari Renstra tersebut dijabarkan lagi menjadi Renja (Rencana Kerja) dalam periode 1 tahun. Kemudian dari Renstra dan

Renja yang telah ditetapkan diajukan ke Bappeda dan keuangan untuk di proses.

2. Bagaimana penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Penggunaan anggaran pada kantor dinas peternakan dan perkebunan disesuaikan dengan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) yang telah ditetapkan.

3. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Pelaporan pertanggungjawaban pertama di sampaikan setiap kepala bagian dari struktur organisasi kepada kepala dinas, kemudian laporan akhir berbentuk neraca di sampaikan ke Bupati melalui badan keuangan daerah.

4. Bagaimana pengelolaan keuangan yang baik ?

Jawab: Pengelolaan keuangan yang baik yaitu dengan mengikuti prosedur atau sistematika yang telah ditetapkan.

5. Apa saja yang biasanya menghambat pelaporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Yang terkadang menghambat pelaporan penggunaan anggaran adalah Jalur koordinasi, karena prosesnya sangat panjang dan memakan waktu yang lama.

6. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan keuangan ?

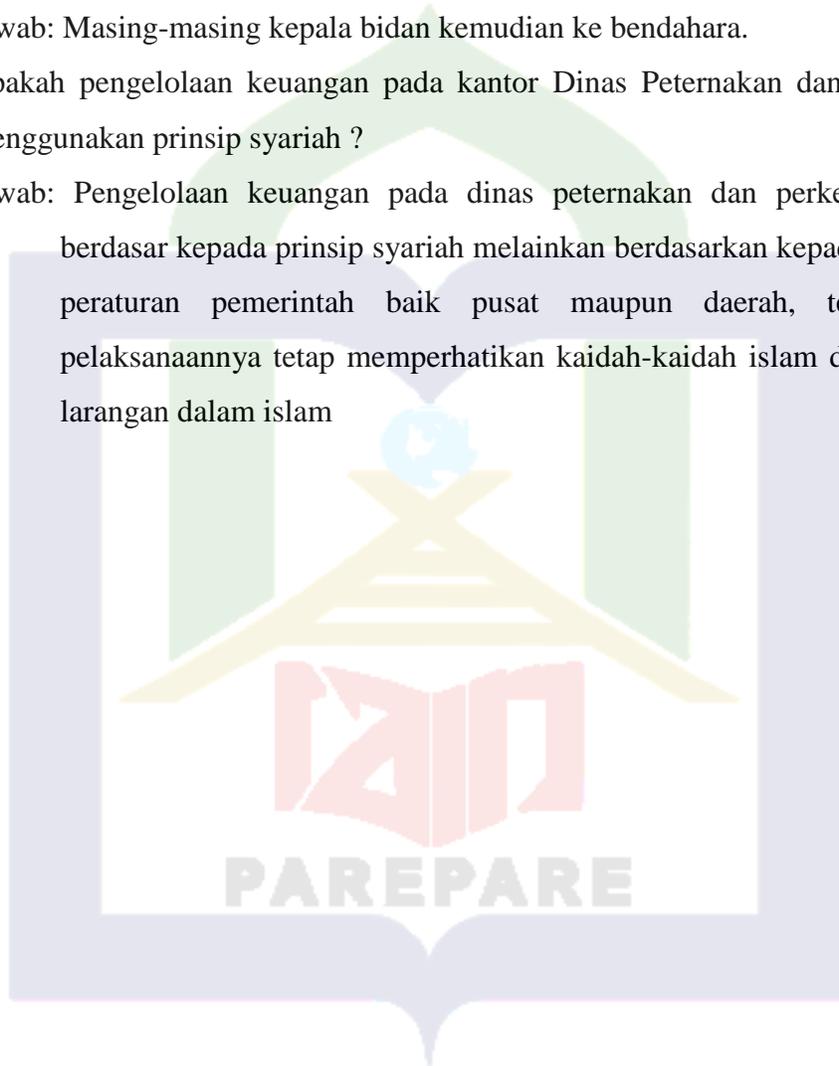
Jawab: Selama kita mengikuti sistematikan penulisan laporan keuangan yang telah ditetapkan maka tidak ada kendala yang di hadapi.

7. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Masing-masing kepala bidan kemudian ke bendahara.

8. Apakah pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan menggunakan prinsip syariah ?

Jawab: Pengelolaan keuangan pada dinas peternakan dan perkebunan tidak berdasar kepada prinsip syariah melainkan berdasarkan kepada peraturan-peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kaidah-kaidah islam dan larangan-larangan dalam islam





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331
Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : LISNADILA
NIM : 18.2900.052
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : AKUNTABILITAS ADMINISTRASI
KEUANGAN PADA KANTOR DINAS
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN
PINRANG BERDASARKAN PRINSIP MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH

TRANSKIP WAWANCARA

Informan 2: Ibu Hajrah, SP, Bagian Kasubag Keuangan

1. Bagaimana proses penganggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Penganggaran pada kantor dinas peternakan dan perkebunan dilakukan dengan penentuan Renstra dan Renja dengan melakukan Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Kemudian hasil pembahasan tersebut di sampaikan ke Bappeda dan keuangan yang dirangkup dalam aplikasi SIKD untuk di proses.

2. Bagaimana penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Penggunaan anggaran disesuaikan dengan program kerja yang telah di buat, dan memfokuskan pada program yang menunjang kesejahteraan masyarakat di bidang perkebunan dan peternakan.

3. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Pelaporan pertanggungjawaban terbagi menjadi 4 yaitu laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan yang disampaikan sesuai waktu yang ditentukan. Laporan tahunan di rangkum di laporan neraca yang di sampaikan ke Bupati melalui badan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIKD.

4. Bagaimana pengelolaan keuangan yang baik ?

Jawab: Pengelolaan keuangan yang baik yaitu dilakukan dengan mengikuti semua prosedur dan koordinasi yang telah ditetapkan

5. Apa saja yang biasanya menghambat pelaporan penggunaan anggaran pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang.

Jawab: Yang terkadang menghambat pelaporan penggunaan anggaran adalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan pada setiap bidan atau bagian

6. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan keuangan ?

Jawab: Selama kita mengikuti sistematika penulisan laporan keuangan yang telah ditetapkan maka tidak ada kendala yang di hadapi.

7. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang ?

Jawab: Masing-masing berperan penting termasuk semua bagian, bendahara dan kepala dinas.

8. Apakah pengelolaan keuangan pada kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan menggunakan prinsip syariah ?

Jawab: Pengelolaan keuangan pada dinas peternakan dan perkebunan tidak berdasar kepada prinsip syariah melainkan berdasarkan kepada peraturan-peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kaidah-kaidah islam dan larangan-larangan dalam islam

Surat Keterangan Wawancara

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>	

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

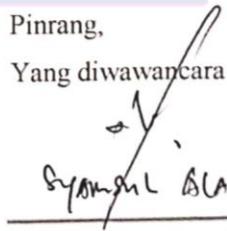
Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL ALAM, SP. M.Si
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : PINRANG .
Pekerjaan : PNS .
Jabatan : PROGRAM & PERENCANAAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LISNADILA yang sedang melakukan penelitian yang berkejujul "Akuntabilitas Admnistrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Berdasarkan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
Yang diwawancara


Syamsul Alam, Sp. M.Si

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM JL Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HAJIHAH, SP
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Alamat : JL SULTAN FASAKH UDDIN
 Pekerjaan : PNS
 Jabatan : KASUBAG KEUANGAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari LISNADILA yang sedang melakukan penelitian yang berwujud "Akuntabilitas Administrasi Keuangan Pada Kantor Dinas Peternakan Dan Perkebunan Kabupaten Pinrang Berdasarkan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,
 Yang diwawancara



HajihaH, SP

Dokumentasi



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PINRANG**

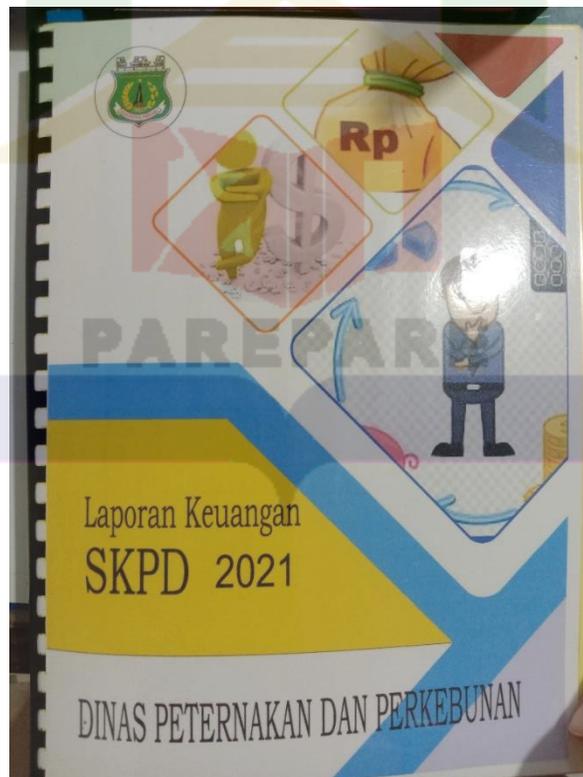


**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023**

**PERUBAHAN
RENSTRA SKPD
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2019 - 2024**



**DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PINRANG
TA.2021**



BIODATA PENULIS



LISNADILA Lahir di Kajuangin, Desa Sabbang Paru, kecamatan Lembang Kabupaten Pirang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Oktober 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Faisal dan Ibu Sumarni.

Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam.

Riwayat pendidikan penulis yaitu memulai pendidikan di sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Kajuangin pada tahun 2007, lalu sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Tuppu pada tahun 2012, lalu menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 9 Pinrang pada tahun 2015. Dan setelah itu melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, mengambil jurusan Manajemen Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Semasa perkuliahan penulis mendapatkan banyak pengalaman dengan berkontribusi dalam berbagai kegiatan organisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya. Pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir dengan judul “Akuntabilitas Administrasi Keuangan pada Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Pinrang”.